

**RELASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PROSES  
PEMUNGUTAN PAJAK DI DESA TABBINJAI  
KEC. TOMBOLO PAO**



**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ilmu Politik  
Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh: **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ALWI DAHLAN**  
**NIM: 30600113194**

**JURUSAN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alwi Dahlan

Nim : 3060011394

Tempat/Tgl. Lahir : Suka, 30 Juli 1993

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik

Alamat : Jl. Dg. Regge Lt. V

Judul : **Relasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam  
Proses Pemungutan Pajak Di Desa Tabbinjai Kec. Tombolo  
Pao**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagianatauseluruhnya, maka skripsi ini dangelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

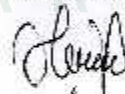
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSARA

Makassar, 24 Agustus 2017

Penyusun,



Alwi Dahlan

Nim: 30600113194

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul **"Relasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Proses Pemungutan Pajak di Desa Tabbinjai Kec. Tombolo Pao."**, yang disusun oleh **Alwi Dahlan**, Nim : **30 600 113 194**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 11 September 2017 M, bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin Filsafat dan Politik, Jurusan Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).\*

Makassar, 15 September 2017 M

23 Zulhijjah 1438 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Tasmin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Syahrir Karim, M.Si., Ph.D	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Muhammad Ramli M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. Ibrahim, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Syahrir Karim, M.Si., Ph.D	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik  
UIN Alauddin Makassar,

  
Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M.A  
NIP. 19590704 198903 1 003

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Karya Terdahulu .....	11
B. Tinjauan Teoritik dan Konseptual .....	16
1. Demokrasi .....	16
2. Teori Konsep <i>Good Governance</i> .....	18
3. Teori Kekuasaan.....	20
4. Konsep Politik Perpajakan .....	22
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian .....	26
1. Sumber Data .....	26
2. Metode Pengumpulan Data .....	26
3. Teknik Analisi Data .....	29
4. Pengujian Keabsahan Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>

A. Gambaran Umum Kecamatan Tombolo Pao .....	32
B. Gambaran Umum Desa Tabbinjai.....	32
1. Sejarah Desa Tabbinjai .....	32
2. Letak Geografis Desa Tabbinjai.....	34
3. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah .....	37
4. Struktur Kepemimpinan dan Pelayanan Publik .....	37
5. Demografis dan Kependudukan .....	39
6. Pendidikan .....	41
7. Mata Pencaharian .....	43
8. Aspek Sosial Budaya .....	45
9. Dinamika Politik .....	46
C. Relasi Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak.....	47
1. Relasi Bersifat Mutualistik.....	53
2. Relasi Bersifat Terbuka.....	58
D. Implikasi Proses Pemungutan Pajak .....	63
1. Pembangunan .....	63
2. Pendapatan Pajak .....	68
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Implikasi Penelitian.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## DAFTAR TABEL

### **Tabel 4.1**

Nama-Nama Pejabat Administrasi Desa Tabbinjai.....	32
--	----

### **Tabel 4.2**

Nama-Nama Badan Permusyawaratan Desa Tabbinjai .....	36
--	----

### **Tabel 4.3**

Nama-Nama Kepala Dusun Desa Tabbinjai .....	37
---	----

### **Tabel 4.5**

Data Jumlah Penduduk Desa Tabbinjai .....	38
---	----

### **Tabel 4.6**

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	39
---	----

### **Tabel 4.7**

Tabel Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	40
---	----

### **Tabel 4.8**

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	42
---	----

### **Tabel 4.9**

Tabel Alur Proses Pemungutan Pajak .....	48
--	----

### **Tabel 4. 10**

Tabel Proses Pemungutan Pajak Di Desa Tabbinjai .....	49
---	----

Gambar Transparansi Pendapatan Desa.....	61
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Syukur Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah penulis haturkan yang sebesar-besarnya atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada penulis diantaranya nikmat iman, kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui beberapa proses yang sangat panjang mulai dari proses belajar, bimbingan, penelitian, sampai pada proses pengujian skripsi penulis dengan judul Relasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Proses Pemungutan Pajak Di Desa Tabbinjai Kec. Tombolo Pao. Dimana skripsi ini merupakan syarat akademis untuk menyelesaikan pendidikan jenjang strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, Dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menjumpai hambatan dan tantangan namun kekuatan doa dan dukungan dari orang-orang yang terkasilah yang penulis jadikan acuan untuk terus maju hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Demikian Pula penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai suatu karya ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu penulis mengharapkan motivasi, dukungan, semangat, kritik, dan saran, yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.



Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga dan sembah sujud kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya dan juga kepada kedua orang tua saya ayahanda Dahlan coe dan Juga Ibunda Hasna yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan, dan mengiringi setiap langkah penulis hingga saat ini, dengan doa yang tiada henti-hetntinya serta dukungan-dukungannya baik secara moril maupun materil. Kepada Ibu nurbaya selaku orang tua di Makassar yang dengan segenap hati menyayangi dan membantu layaknya anak kandung sendiri. Dan segenap keluarga besar Tanta Baya Foundation yang selalu membantu dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang senantiasa menjadi inspirasi dalam dalam hidup saya sehingga saya memiliki kemauan untuk menuntut ilmu lebih tinggi yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Natsir Siola, MA Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi M.Si selaku ketua Jurusan dan Bapak Syahrir Karim, M.Si. Ph.D selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
4. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi M.Si selaku pembimbing 1, Bapak Syahrir Karim, M.Si.Ph.D selaku pembimbinng 2

5. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Politik dan seluruh karyawan fakultas ushuluddin Filsafat dan Ilmu Politik yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian study ini.
6. Teman-teman seperjuang Ilmu Politik (ipo 11/12) yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman dari Relawan Nusantara, yang selalu memberikan suport dan dorongan kepada penulis untuk segera sarjana.

Dan semoga segala bantuan yang diberikan bernilai ibadah dan mendapatkan Ridho Allah SWT sehingga Pada akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan seluruh pembaca pada umumnya.



Samata, 23 Agustus 2017

Penulis

## ABSTRAK

**Nama : Alwi Dahlan**  
**Nim : 30600113194**  
**Judul : Relasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Proses Pemungutan Pajak Di Desa Tabbinjai Kec. Tombolo Pao**

---

Skripsi ini mengkaji tentang relasi masyarakat dan pemerintahan desa dalam proses pemungutan pajak di Desa Tabbinjai Kec. Tombolo Pao. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi masyarakat dan pemerintahan desa dalam proses pemungutan pajak dan implikasi pemungutan pajak di Desa Tabbinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melalui dua metode pengumpulan data yaitu pertama data primer yaitu melalui observasi, wawancara, dan kemudian kedua data sekunder yaitu melalui kajian pustaka melalui buku, dokumentasi, jurnal, skripsi, laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penelitian. Ada beberapa teori yang dipakai yaitu: Teori demokrasi, konsep good governance, teori kekuasaan, dan konsep politik perpajakan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa dalam proses pemungutan pajak di Desa Tabbinjai antara pemerintah desa dan masyarakat itu bersifat mutualistik dimana pemerintah desa memiliki itikad baik dengan melunasi iuran pajak terlebih dahulu sebelum jatuh tempo. Masyarakat sangat terbantu dengan itikad baik tersebut karena bisa menunggu waktu panen untuk membayar pajak sedangkan pemerintah akan berkesempatan untuk memperoleh nama baik dari pemerintah kabupaten. Selain itu relasinya juga bersifat terbuka dimana transparansi pemerintah desa tabbinjai juga sangat baik, hal ini dibuktikan dengan tinggat kesadaran masyarakat dalam melunasi pajak. Selanjutnya implikasi proses pemungutan pajak di Desa Tabbinjai ada dua hal pokok yakni dari segi pembangunan sendiri ada beberapa sektor yang sudah diraskan masyarakat seperti infrastruktur jalan dan transportasi sedangkan dari segi pendapat pajak, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, akan tetapi setidaknya mampu memberikan sumbangsih untuk penerimaan pembiayaan negara untuk pembangunan nasional.

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Perlunya peningkatan sosialisasi agar masyarakat semakin paham dengan proses perpajakan. 2) Perlunya pengukuran tempat-tempat yang belum memiliki objek pajak sehingga bisa meningkatkan pendapatan pajak.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut perspektif teori negara, bahwa pemerintah yang sah adalah pemerintah yang memperoleh legitimasi politik dari rakyat, artinya rakyat telah memberikan persetujuan politik kepada rezim yang berkuasa. Atas persetujuan atau legitimasi yang telah diberikan oleh rakyat, maka negara (pemerintah) harus menunaikan kewajibannya untuk memberikan jaminan social yang adil kepada rakyat, dapat melindungi yang lemah dan membatasi yang kuat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan suatu keteraturan social.<sup>1</sup>

Suatu negara terbentuk atas adanya suatu kelompok masyarakat, yang ingin bersatu dalam suatu lingkup organisasi yang sangat besar. Eksistensi suatu negara itu hadir karena adanya warga negara dalam hal ini rakyat yang menjadi penyokong dan penguatnya. Begitu pun rakyat akan mampu eksis dan bertahan hidup karena ada negara yang melindungi segenap keperluan dan kebutuhan hidup mereka. Antara negara dan masyarakat itu saling bergantung, saling membutuhkan sehingga terjadi yang namanya rantai kehidupan bernegara.

Negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Maka kepentingan umum

---

<sup>1</sup> Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. 115.

didahulukan atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan luasnya tanggung jawab negara, maka negara membutuhkan dukungan financial dari rakyat, maka negara membuat ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan pijakan untuk mengimbangi ketimpangan social dalam masyarakat dengan pajak. Tegasnya negara, punya beban social kemanusiaan dan untuk memenuhinya negara membuat ketentuan untuk mewajibkan warga negara atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan sesuai dengan kemampuan.<sup>2</sup>

Sejarah telah menjelaskan kepada kita bahwa eksistensi suatu negara dimanapun di dunia sangat ditentukan oleh seberapa besar loyalitas rakyatnya kepada negara. Untuk mengukur loyalitas rakyat kepada negara salah satu indikatornya adalah seberapa besar kepedulian rakyat untuk membayar pajak kepada negara sebagai sumber anggaran penyelenggaraan negara. Oleh karena itu pajak akan selalu menarik untuk menjadi pembicaraan sekaligus perdebatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, secara bertahap peran pajak mengalami pergeseran yang cukup fantastik. Betapa tidak, pajak yang sebelumnya hanya sebagai pelengkap penerimaan dalam negeri kini telah bergeser dan berada pada posisi yang amat sangat menentukan. Meskipun masih banyak pihak yang kurang puas dengan terhadap kinerja perpajakan. Namun satu hal

---

<sup>2</sup> Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. xxii.

<sup>3</sup> Edi Slamet Irianto, *Pajak Negara dan Demokrasi* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), h. v.

yang sangat sulit terbantahkan adalah kontribusi penerimaan pajak yang saat ini sudah mencapai 80% terhadap penerimaan dalam negeri. Kedepan peran pajak akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat dalam masalah perpajakan.<sup>4</sup>

Penerimaan pajak negara dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Peningkatan pajak yang besar itu sebagian dari kontribusi masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan negara. Pajak sudah menjadi sumber utama penerimaan negara, tentu besar arti dan maknanya bagi masyarakat luas. Pajak merupakan bagian dari ideology yakni ideology pancasila yang telah disepakati. Dalam umat beragama, pajak dapat diinternalisasikan sebagai utang kepada negara yang membayarkan adalah hukumnya wajib. Dalam masyarakat sekuler membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, dapat diobjektifikasikan bahwa pajak merupakan zakat atau pajak islami yang dibayarkan kepada negara sebagai bagian dari kewajiban keagamaan.<sup>5</sup>

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

---

<sup>4</sup> Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. xvii.

<sup>5</sup>Syarifuddin Jurdi. *Ilmu Politik Profetik* (Makassar: Laboratorium Ilmu politik, 2015) h. 206.

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat/negara sehingga hasilnya masuk ke kas negara.<sup>6</sup>

Pajak dilihat dari segi politik dapat dimaknai sebagai investasi politik seorang warga negara kepada negara, investasi dimaksudkan sebagai tabungan rakyat dalam rangka membantu negara dalam membiayai proyek-proyek politiknya sehingga ada preferensi politik bagi warga negara yang bersangkutan dalam setiap proses politik yang diselenggarakan pemerintah, artinya masyarakat pembayar pajak mempunyai hak yang sama dengan kata lain memiliki semacam otoritas untuk mengetahui pengelolaan pajak terutama berkaitan dengan penentuan kebijakan negara mengenai pengumpulan, pengadministrasian dan pemanfaatan pajak.<sup>7</sup>

Sudah saatnya, masyarakat mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah perpajakan dalam konteks kehidupan negara yang demokratis. Dalam negara yang modern dan demokratis, pajak dipahami sebagai kewajiban demokrasi warga negara. Oleh karena itu, pajak bukan hanya menjadi domain pemerintahan yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak semata, akan tetapi telah menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa yang menghendaki berjalannya sistem kenegaraan yang demokratis. Pemahaman semacam ini menjadi penting bagi kita sebagai bangsa, agar kita tidak terjebak pada retorika politik yang cenderung

---

<sup>6</sup>Rosmiati. *Modul Administrasi Pajak* (SMK 7 Makassar, 2015), h. 1.

<sup>7</sup> Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. xv.

saling menyalahkan tanpa memahami esensi posisi kita masing-masing dalam kehidupan bernegara.<sup>8</sup>

Selama ini pajak hanya dibebankan kepada para pelaku perpajakan yang dibebankan oleh negara dalam hal ini para pemungut pajak. Sementara mereka sebagai pembayar pajak tidak pernah mengetahui pajak yang disetorkan kepada negara, digunakan untuk apa dan bagaimana proses pendistribusiannya.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>9</sup>

Kerelaan rakyat membayar pajak sesungguhnya bagian dari komitmen rakyat untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial dalam masyarakat dan menjadi inti dari makna sosial pajak. Dalam hal ini, negara membatasi yang kuat dengan diwajibkan membayar pajak dan melindungi yang lemah dengan mendistribusikan uang pajak kepada mereka yang lemah secara merata dan adil sesuai amanat konstitusi dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, bahwa negara harus memberikan jaminan yang adil kepada rakyat dengan menggunakan uang pajak.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. xvii.

<sup>9</sup> Rosmiati. *Modul Administrasi Pajak* (SMK 7 Makassar, 2015), h. 1.

<sup>10</sup> Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. xii.



Dalam menerapkan proses pemungutan pajak, negara harus memenuhi beberapa persyaratan; pertama, negara dalam memungut pajak harus adil (syarat keadilan) merupakan tujuan dari pajak, artinya wajib pajak dikenakan sesuai dengan standarnya yakni secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kedua, mereka yang diberi tugas (Dirjen Pajak) harus memungut pajak berdasarkan Undang-Undang (syarat Yuridis). Ketiga, negara perlu menerapkan standar kerja yang akan dilakukan dengan menggunakan uang pajak, sebab ada kesan selama ini, negara menggunakan uang pajak secara elitis sehingga rakyat tidak mengetahui uang pajak dipergunakan untuk keperluan apa.<sup>11</sup>

Dengan posisi pajak yang begitu pentingnya pajak bagi kelangsungan suatu negara dan masyarakat, maka pengelolaannya pun harus dilakukan secara transparan, dan selalu ada control yang bagus dari rakyat sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam dunia perpajakan yang merupakan notabene pendapatan negara. Pajak dapat membuat orang tertentu mejadi milyarder apabila tidak ada pengelolaan yang terstruktur. sumber pajak sebagian besar berasal dari rakyat, jadi pengelolaanya juga harus betul-betul merakyat dan tidak boleh melanggar aturan hukum. seperti yang tercermin dalam firman Allah swt, QS. An- Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

---

<sup>11</sup> Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. xxii.

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.*<sup>12</sup>

Dalam ayat tersebut diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesama dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan. Adapun relevansinya dalam proses pemungutan pajak yakni kita dituntut untuk melakukan proses perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya batil adalah memalukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Singkatnya proses pemungutan pajak harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya:

*Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram. (HR bukhari Al-Buyu: 7)*<sup>13</sup>.

Adapun relevansi dengan hadis diatas yang berkaitan dengan pajak yakni banyak pihak-pihak yang tidak melaksanakan prosedur perpajakan yang tidak sesuai aturan. Mereka kebanyakan tidak mendistribusikan uang pajak sesuai dengan aturan.

Masyarakat di tuntut untuk membayar pajak dan banyak disalahgunakan oleh pihak-

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Solo: Penerbit Arbayan 2014), h. 83.

<sup>13</sup> Aden Muzakki. *Ayat dan Hadis Tentang Pajak dan Asuransi* (September 2011), h. 1 <http://www.google.co.id/webhpsourceid=chrome-instan&ion=1&espv=2&ei=UTF-8#q=wordpress+hadist+tentang+Pajak> (Diakses 24 September 2016).

pihak tertentu tanpa memandang halal atau haram yang mereka lakukan dengan pajak ini.

Seperti halnya di tempat kelahiran penulis, juga dijumpai proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak dipedesaan. Para pembayar pajak hanya mengetahui jumlah pajak yang akan dibayar ketika para petugas pajak datang membawa struk pajak yang akan dilunasi. Mereka tidak pernah mengetahui secara pasti uang yang mereka setor itu jalurnya seperti apa. Akan dikemana uang yang mereka bayar. Seharusnya para objek pajak mengetahui alurisasi pajak dan ikut terlibat aktif dalam proses perpajakan. Mereka harus turut aktif dalam segala perumusan pajak termasuk pengumpulan, pengadministrasian dan bahkan sampai pada pemanfaat pajak. Mereka harus memperoleh pemahaman yang memadai tentang proses perpajakan, dalam hal ini pemerintah desa harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses perpajakan.

Hal seperti yang mungkin hampir sama dengan daerah-daerah yang ada disekitar kampung kelahiran penulis atau bahkan setiap daerah yang ada di Indonesia. Pemerintahan desa dalam hal ini para petugas pajak tidak pernah melakukan tugasnya untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan. Dimana seharusnya negara dalam pemerintahan desa memberikan pemahaman yang baik terhadap pajak itu sendiri. Karena ada dasarnya pajak itu adalah investasi politik seorang warga negara kepada negara. Dimana dalam hal ini masyarakat membantu negara dalam membiayai proyek-proyek pembangunan sehingga masyarakat mempunyai hak politik atau semacam otoritas dalam proses pemungutan pajak.

Hal inilah yang kemudian mendasari penulis untuk meneliti tentang relasi masyarakat dan pemerintahan desa dalam proses pemungutan pajak di Desa Tabbinjai Kec. Tombolo Pao.

### ***B. Rumusan Masalah***

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas, yaitu

1. Bagaimana relasi masyarakat dan pemerintahan desa dalam proses pemungutan pajak di Desa Tabbinjai Kec. Tombolo Pao ?
2. Bagaimana implikasi pemungutan pajak terhadap masyarakat di desa Tabbinjai Kec. Tombolo Pao ?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui relasi masyarakat dan pemerintahan desa dalam proses pemungutan Pajak di desa Tabbinjai Kec. Tombolo Pao.
2. Untuk mengetahui implikasi pemungutan Pajak terhadap masyarakat di desa Tabbinjai Kec. Tombolo Pao.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Tercapainya tujuan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang mencakup pada kepentingan-kepentingan diantaranya:

1. Manfaat Akademik
  - a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi didalam menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu sosial pada umumnya dan

ilmu politik pada khususnya terutama terkait dengan pembahasan mengenai relasi masyarakat dan pemerintahan desa terkait dengan proses pemungutan pajak.

- b. Diharapkan dapat menjadi literatur yang membantu peneliti berikutnya yang juga akan meneliti seputar relasi masyarakat dan negara terkait proses pemungutan pajak.
- c. Memperdalam pengetahuan tentang politik perpajakan

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas politik.
- b. Untuk memberikan informasi sebagai bahan perbandingan dalam memahami politik dalam masyarakat.
- c. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan landasan teori yang berupa konsep dan prinsip dasar yang digunakan dalam pemecahan masalah. Adapun bagian-bagian dari tinjauan pustaka antara lain:

#### ***A. Tinjauan Karya Terdahulu***

1. “Jurnal yang berjudul Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam peningkatan pendapatan daerah (studi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Limpasu” oleh Eddy Rahmawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan pajak bumi dan bangunan, factor-faktor yang mempengaruhi dalam optimalisasi pemungutan, dan memberikan solusi atas factor-faktor yang berpengaruh dalam optimalisasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai dalam peningkatan pendapatan daerah belum mencapai dari target yang diharapkan, Ini disebabkan karena kurang efektifnya pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang masih sangat kurang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari kurang efisiennya pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut para aparat atau fiskus menemui faktor yang

mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan baik itu yang datang dari wajib pajak ataupun dari petugas pajaknya serta kejelasan dan kepastian hukum<sup>14</sup>. Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian penulis yakni pada penelitian ini fokus untuk melihat dan menggambarkan bagaimana bentuk relasi yang tercipta dalam proses pemungutan pajak di desa Tabbinjai.

2 “Jurnal yang berjudul Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda” oleh Harun Nisa . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dan kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi tentang pelaksana pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2 di Kota Samarinda secara yuridis sudah cukup memadai terutama aspek aturan, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Berdasarkan kesimpulan tersebut Dinas Pendapatan Kota Samarinda selalu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Samarinda khususnya dalam hal pembayaran PBB, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal, lebih intensif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pajak

---

<sup>14</sup> Eddy rahmawan, Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Daerah, Maret 2016.

Bumi dan Bangunan<sup>15</sup>. Pada penelitian ini lebih berfokus kepada pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di dinas pendapatan daerah kota samarinda sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis yakni pada penelitian ini ingin menjelaskan tentang bagaimana proses relasi dalam pemungutan pajak di desa Tabbinjai.

3. “ Jurnal yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sector perkotaan di Kecamatan Medan Selayang” oleh Yudita Kristina Barus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di sektor perkotaan di Kecamatan Medan Selayang. Evaluasi pelaksanaan pemungutan PBB ini menggunakan teori Edward III yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi serta teori dari Van Meter. Hasil penelitian menyebutkan bahwa evaluasi pelaksanaan pemungutan di kecamatan Medan Selayang kurang baik, dilihat dari hasil pemngutan yang tidak sesuai dengan target. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi ialah PBB ganda, kurangnya komunikasi antar petugas pemungut, kurangnya komitmen para petugas, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, masih kurangnya petugas yang khusus menangani PBB dan PBB masih kurang tepat sasaran. Van Horn yakni standar dan tujuan kebijakan<sup>16</sup>. Pada penelitian di atas menjelaskan bagaimana evaluasi pemungutan pajak bumi dan bangunan sector perkotaan di kecamatan medan

---

<sup>15</sup> Hairun nisa, Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Derah Kota Samarinda, 29 Juli 2016.

<sup>16</sup> Yudi khristina barus, Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Di Kecamatan Medan Selayang, Juni 2015.



selayang, sedangkan pada penelitian ini penulis ingin menjelaskan bagaimana relasi yang tercipta dalam proses pemungutan pajak di desa tabbinjai.

4. “Jurnal yang berjudul Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pontianak” oleh Tara Arestu Ramanda. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam peningkatan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota Pontianak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya factor internal yang dimiliki dan factor eksternal yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Factor internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta factor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Kedua factor tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis matriks SWOT dan kemudian ditemukannya alternative strategi untuk dapat meningkatkan pemungutan pajak bumi dan bangunan serta secara langsung meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pontianak. Jadi rekomendasi alternative strategi yaitu strategi pelayanan dan pendapatan online, strategi pembinaan dan peningkatan SDM, strategi pemutakhiran data, strategi sosialisasi interaktif, dan strategi pemberdayaan petugas lapangan<sup>17</sup>. Pada penelitian di atas menjelaskan tentang strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota Pontianak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sedangkan pada penelitian ini, penulis ingin menjelaskan bagaimana relasi yang tercipta dalam proses pemungutan pajak dan implikasi yang dihasilkan dalam proses pemungutan tersebut.

---

<sup>17</sup> Tara restu ramanda, Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak,

5. “Jurnal yang berjudul Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Wilayah Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2001)” oleh Puji Astuti. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Tahun 2011, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan perhitungan uji hipotesis menyatakan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Cimuncang Tahun 2011 sebesar 64,6%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar PBB yaitu tidak adanya sosialisasi Kelurahan, belum tegasnya penegakkan hukum, dan pemutakhiran data, belum dirasakannya pembangunan prasarana daerah. Saran dalam penelitian ini adalah Kelurahan melakukan sosialisasi kontinue, kantor pajak melaksanakan disiplin terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan dan dilakukannya pemutakhiran data, pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan dan pembangunan prasarana daerah<sup>18</sup>. Pada penelitian di atas menjelaskan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sedangkan pada penelitian ini, penulis ingin menjelaskan bagaimana relasi dalam proses pemungutan pajak dan implikasi dalam prose pemungutan pajak tersebut.

---

<sup>18</sup> Puji Astuti, Tingkat Kepatuhan masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Cimuncung Kecamatan Serang, Juli 2012.

Dari 5 tulisan diatas, semuanya menjelaskan tentang proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian diatas berfokus pada bagaimana proses pemungutan, kendala, dan factor-faktor yang mempengaruhi dalam kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan pada penelitian ini , penulis mencoba melihat bagaimana relasi negara dan masyarakat terhadap pemungutan pajak dan implikasi atau dampak dari proses pemungutan pajak yang ada di desa Tabbinjai.

### ***B. Tinjauan Teoritik dan Konseptual***

#### ***1. Demokrasi***

Demokrasi telah menjadi pilihan utama para pemimpin negara-negara modern baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, sebab demokrasi memberikan jaminan bagi pluralisme. Namun, demokrasi telah menjadi semacam wacana politik semata, sebab negara-negara maju yang memelopori demokrasi tidak kunjung memperlihatkan sikap dan tindakan yang demokratis, sekalipun juga suatu negara menganut sistem demokrasi. Demokrasi hanya ada dalam lembaran negara. Sementara praktek politik pemerintahan sebuah rezim yang berkuasa sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi.<sup>19</sup>

Demokrasi menurut Schumpeter adalah sebagai suatu mekanisme dimana elit-elit politik bersaing dalam suatu pemilihan umum yang dilaksanakan secara bebas, dimana rakyat terlibat dalam menentukan elit politik yang bakal berkuasa. Robert Dahl merumuskan suatu tatanan politik yang disebutnya “poliarki istilah yang

---

<sup>19</sup> Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. 1.

dipakainya untuk menyebut demokrasi. Menurutnya ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Tatanan politik seperti itu bisa digambarkan dengan memakai dua dimensi teoritik, yaitu seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan dan seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu.<sup>20</sup>

Menurut hemat penulis bahwa demokrasi dengan menggabungkan pendapat kedua ahli diatas adalah segala bentuk aktivitas kenegaraan harus melibatkan warga negara karena yang mejadi pemegang kekuasaan juga berasal dari warga negara. Demokrasi disini mutlak menghadirkan suara rakyat dalam setiap aktivitas politik. Warga Negara adalah tujuan utama dari adanya negara dengan prinsip demokrasi.

Demokrasi membuka peluang bagi adanya kompetisi, kontestasi, dan oposisi. Pihak yang menang akan berkuasa dan yang kalah akan menjadi opsisi terhadap kekuasaan. Warga negara yang memiliki hak untuk bersaing dalam lapangan politik terbuka peluang, asal memenuhi ketentuan demokratik yang dipersyaratkan. Persaingan dan kontestasi akan bermuara pada pembentukan lembaga-lembaga negara yang bertugas untuk melayani kepentingan public, selain tugas-tugas kehakiman dan legislative. Tugas-tugas itu dapat disebut antara lain departemen keuangan yang membawahi perpajakan, departemen kesehatan, departemen social

---

<sup>20</sup> Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. 10.

dan departemen atau lembaga resmi negara lainnya.<sup>21</sup>. Teori penulis gunakan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pemungutan pajak, karena inti dari demokrasi adalah sejauh mana keterlibatan masyarakat sendiri dalam segala aktivitas pemerintahan.

## 2. Teori Konsep Good Governance

Menurut World Bank, kata governance di artikan sebagai “ *the way state power is used in managing economic and social resources for development society*”. Dari pengertian di atas diperoleh gambaran bahwa “ Governance adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Sejalan dengan pendapat World Bank diatas, UNDP mengemukakan definisi *Governance* sebagai “ *the exercise of political, ekonomi and adminidtrative authority to manageanation’s affair at all levels*”. Dengan demikain kata governance berarti penggunaan atau pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrative untuk mengelolah masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Disini tekanannya pada kewenangan , kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. Berbicara kewenangan berarti menyangkut domain sektor public.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. 11.

<sup>22</sup> Syahrir Karim. *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*. (Makassar: Alauddin University Press 2012), h 97.

Menurut UNDP, *governance* didukung oleh tiga kaki yakni politik, ekonomi serta administrative. Kaki pertama yaitu tata pemerintahan dibidang politik dimaksudkan sebagai proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan public, baik yang dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun birokrasi bersama-sama politisi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan tidak hanya pada tataran implementasi seperti yang selama ini terjadi, melainkan mulai dari formulasi, evaluasi sampai pada implementasi.<sup>23</sup>

Menurut Achmad Santosa, *governance* memiliki standar dan ukuran tersendiri untuk dapat dikatakan baik. Adapun kriteria *governance* itu sendiri apabila memenuhi kriteria berikut,

- a. Sumber daya ataupun masalah-masalah publik dikelola secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Pengelolaan dilakukan secara efisien dan responsif, dilandasi oleh iklim politik yang demokratis.
- c. Sumber daya dan masalah publik tersebut dikelola secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.<sup>24</sup>

Menurut hemat penulis berdasarkan beberapa pendapat para ahli, bahwa *good governance* adalah suatu tata pemerintahan yang baik, dimana semua aktivitas pemerintahan dilakukan secara transparan dan melibatkan semua elemen-elemen

---

<sup>23</sup> Syahrir Karim. Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal. (Makassar: Alauddin University Press 2012), h 97.

<sup>24</sup> Anggriani Alamsyah. Etika Politik (Makassar: Alauddin press, 2012), h. 168

masyarakat dalam perumusan, pembuatan dan realisasi suatu kebijakan. Pengikutsertaan masyarakat dapat dilakukan secara langsung dengan mengundang para perwakilan kelompok masyarakat dalam suatu rapat ataupun tidak langsung dengan menyebarkan informasi secara jelas dan cepat melalui media sosial. Teori ini penulis gunakan untuk melihat secara langsung transparansi tata pengelolaan pemerintahan yang ada di desa tabbinjai.

### 3. Teori Kekuasaan

Apabila negara dipahami sebagai suatu manifestasi kehendak umum dengan berbagai kelembagaannya seperti pemerintahan (eksekutif, legislative, dan yudikatif), maka objek pembahasan ilmu politik berikutnya selalu actual yakni mengenai kekuasaan. Konsep kekuasaan mempunyai sifat yang mendasar dalam ilmu sosial pada umumnya, dan ilmu politik pada khususnya. Sebagian kalangan mengidentikkan bahwa politik adalah kekuasaan itu sendiri, meski ilmu politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan semata. Tetapi kekuasaan telah menjadi gejala sentral dalam ilmu politik dan terus menjadi sesuatu yang selalu hangat diperdebatkan. Dalam sejumlah kajian para ilmuwan politik, kekuasaan telah ditafsir secara beragam khususnya berkaitan dengan hakikat kekuasaan, namun secara umum kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Syarifuddin Jurdi. *Ilmu Politik Profetik* (Makassar: Laboratorium Ilmu politik, 2015) h. 35.

Kekuasaan dengan meminjam Almond dan Genco sebagai bagian dari aktivitas yang berkaitan dengan pengaruh, bahkan kajian politik berkaitan dengan kajian tentang pengaruh dan orang yang berpengaruh. Ilmu politik menyatakan syarat, sedangkan filsafat politik membenarkan pilihan. Lasswell menyebutkan bahwa ilmu politik hanya menentukan syarat dan tidak menentukan pilihan. Orang yang berpengaruh adalah orang yang memperoleh banyak dari apa yang dapat diperoleh. Nilai-nilai yang ada dapat digolongkan kedalam golongan rasa hormat, pendapatan, keamanan. Orang-orang yang memperoleh pada umumnya adalah elite sedangkan yang lain adalah massa.<sup>26</sup>

Menurut Machiavelli kekuasaan dapat diartikan sebagai alat atau instrument belaka untuk mempertahankan nilai-nilai moralitas, etika, dan agama. Kekuasaan menurutnya sebagai *raison d'etre* negara. Kekuasaan dapat dimaknai pula dengan dimensi sosial, khususnya dalam kaitannya dengan relasi sosial seperti yang dinyatakan oleh sosiolog Talcott Parsons. Ia menyatakan sebagai kemampuan pada umumnya untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam hubungan sosial, terpisah dari alat yang digunakan atau status “pemberian wewenang” untuk membuat keputusan atau menentukan kewajiban. Para pemegang kekuasaan memiliki otoritas untuk

---

<sup>26</sup>Syarifuddin Jurdi. *Ilmu Politik Profetik* (Makassar: Laboratorium Ilmu politik, 2015) h. 36.



menentukan sejumlah kebijakan dan kewajiban kepada warga negara, karena kekuasaan berkaitan dengan dominasi dan penyerahan diri.<sup>27</sup>

Dari dua pengertian diatas, maka penulis dapat sedikit menyimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk mau mengikuti kemauan yang memiliki kekuasaan. Biasanya yang mempunyai kekuasaan adalah golongan-golongan tertentu dalam jumlah sedikit dan punya sedikit daya dibanding yang lainnya. Pada intinya kekuasaan itu adalah penguasa, dipengaruhi dan mempengaruhi.

Dengan jelas bahwa kekuasaan diperlukan untuk memediasi kepentingan-kepentingan individu yang saling bersaing. Untuk menuntut ketatan dari warga negara dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kebijakan lalu lintas, tertib umum, membayar pajak, redistribusi, dan sebagainya. Kekuasaan dianggap penting oleh semua orang karena memiliki nilai-nilai universal seperti menciptakan keteraturan, keamanan, keseimbangan, antara kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Teori ini penulis gunakan untuk melihat pengaruh dari pemerintahan desa dalam proses pemungutan pajak terhadap masyarakat.

#### 4. Konsep Politik Perpajakan

Mendengar kata pajak, kebanyakan dari kita akan segera terstimulasi untuk mengasumsikannya sebagai suatu beban tambahan yang cukup signifikan ditengah belitan kesulitan ekonomi yang semakin berat dari waktu ke waktu. Hal tersebut,

---

<sup>27</sup>Syarifuddin Jurdi. *Ilmu Politik Profetik* (Makassar: Laboratorium Ilmu politik, 2015) h. 37.

tentu saja, sebagian dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri. Kesadaran akan pajak memang perlu ditingkatkan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana sehingga masyarakat tidak menjadi empati terhadap pajak. Kath Nightingale dalam bukunya “Taxion” Theory and Practice” menyatakan bahwa pajak telah ada sejak awal kelahiran masyarakat, dan dikatakan pula bahwa pajak merupakan bagian tidak terpisahkan dari harga yang harus dibayar untuk hidup ditengah masyarakat yang terorganisir itu. Dia juga menyebut bahwa pajak adalah sebuah kerangka model *socioeconomic* yang mencerminkan kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu waktu, perubahan akan kebutuhan-kebutuhan tersebut sering kali tergambar dari perubahan system perpajakannya.<sup>28</sup>

Menurut Leroy Beaulieu, bahwa pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintahan. Menurut Dr. Soeparmana Soemahamidjaja mengatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani menyatakan bahwa pajak ialah iuranmasyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya

---

<sup>28</sup> Hery Purwono. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 4.

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>29</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat sedikit menyimpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran yang harus dibayar oleh setiap oaring atau badan hokum yang terkena wajib pajak dan negara selaku pemilik otoritas kekuasaan dapat melakukan paksaan agar dilakukan pembayaran pajak. Pajak ini digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan infrastruktur negara demi kemajuan bangsa. Teori ini penulis gunakan untuk melihat dan menjelaskan proses pemungutan pajak dan menjadi landasan dalam menganalisis hasil pembahasan penelitian.



---

<sup>29</sup>Hery Purwono. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 6.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini memuat tentang penjelasan secara lengkap dan terinci tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini. Metode yang diterapkan pada penelitian ini antara lain:

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada umumnya penelitian terbagi atas penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.<sup>30</sup> Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah metode yang menjadi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>31</sup>. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami (understandable) dan jika memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru<sup>32</sup>.

Menurut Lexi J. Moleong, penelitian kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

---

<sup>30</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9

<sup>31</sup> Bogdan Taylor, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 31

<sup>32</sup> Muriati Samsuddin, dkk. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method* (Bandung: Wadegroup, 2015), h. 19

husus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>33</sup>. Penelitian ini pula bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai objek atau bidang tertentu<sup>34</sup>.

## ***B. Lokasi Penelitian***

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 3 bulan (April-Juni) tahun 2017 di desa Tabbinjai, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

### ***1. Sumber Data***

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dua jenis sumber data yang diperlukan yaitu:

- a. Data Primer, data primer dikumpulkan melalui studi lapangan yang diperoleh dari narasumber dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam<sup>35</sup>.
- b. Data Sekunder, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan melalui berbagai metode seperti membaca buku, karya tulis ilmiah, dan berbagai literatur-literatur lainnya yang memiliki hubungan dengan tulisan ini.

### ***2. Metode Pengumpulan Data***

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode guna memperoleh data yang diinginkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 6

<sup>34</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet, XI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 7

<sup>35</sup> Cholid Narbuko, dkk. *Metodologi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 83

a. Observasi

Observasi merupakan suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan pembicaraan subyek penelitian dengan menggunakan pedoman observasi<sup>36</sup>. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipan, yaitu penelitian tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Adapun yang menjadi objek observasi adalah proses pemungutan pajak di desa Tabbinjai kecamatan Tombolo Pao.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara ( *interview* ) dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi ( data ) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka ( *Face to Face* ). Namun demikian teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung, melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana telekomunikasi lain, seperti telpon dan internet.<sup>37</sup>. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur atau lebih dikenal dengan wawancara mendalam. Wawancara ini mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi

---

<sup>36</sup> Muriati Samsuddin, dkk. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method* (Bandung: Wadegroup, 2015), h. 55.

<sup>37</sup> Suyanto, Bagong. Sutinah. *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), h. 70.

dari semua informan , tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap informan<sup>38</sup>.

Penulis akan secara langsung melakukan wawancara dengan key informan yaitu dalam hal ini orang yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang mendalam. Informan yang terpilih yaitu:

1. Kepala Desa Tabbinjai
2. Muh. Agus selaku petugas pajak di desa tabbinaji
3. A. Syahrullah selaku petugas pajak
4. Bado Selaku petugas Pajak
5. Nasir selaku petugas Pajak
6. Bahar, wajib pajak
7. Nuru Tuppu, wajib pajak
8. Safar, wajib pajak
9. Ramang, wajib Pajak
10. Nasrun, Wajib Pajak

C. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokument, peraturan-peraturan, notulen rapat,

---

<sup>38</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 181

catatan harian dan sebagainya<sup>39</sup>. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

### 3. *Teknik Analisi Data*

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data<sup>40</sup>. Pengerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan.

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya<sup>41</sup>.

#### 2. Penyajian Data

---

<sup>39</sup> Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 168.

<sup>40</sup> Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 1998), h. 108

<sup>41</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 92.



Negara data yang telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Adapun bentuk penyajiannya adalah dalam bentuk naratif deskriptif (Pengungkapan secara tertulis)<sup>42</sup>. Tujuannya adalah memudahkan dalam mendeskripsikan suatu peristiwa, sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau *Verifikasi Data*

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid mengungkapkan, bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dan melibatkan pemahaman peneliti<sup>43</sup>. Kesimpulan yang ditetapkan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel<sup>44</sup>.

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data teori pembanding tertentu melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

### 4. *Pengujian Keabsahan Data*

---

<sup>42</sup> Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71

<sup>43</sup> Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71

<sup>44</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 99

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Selain itu pengamatan yang juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu relasi masyarakat dan pemerintahan desa dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Tabbinjai Kecamatan Tombolo Pao. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

Oleh karena itu, kesadaran terhadap tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada pada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

Tujuan dari triangulasi ini bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan bagian yang memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh sebagai data hasil penelitian. Adapun bagian-bagian dari hasil dan pembahasan antara lain:

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Tombolo Pao**

Tombolo pao adalah sebuah kecamatan yang ada di kabupaten gowa, sulawesi selatan. Kecamatan tombolo pao dibentuk dari pemekaran kecamatan tinggi moncong pada tahun 1998. Wilayah kecamatan tombolo pao berbatasan dengan kecamatan sinjai barat di kabupaten sinjai sebelah utara. Kecamatan bontocani di kabupaten bone dan kecamatan tanralili di kabupaten maros sebelah barat. Kecamatan tinggimoncong di sebelah selatan.

Kecamatan tombolo pao mempunyai 9 desa, Desa kanreapia, Desa Tonasa, Kelurahan Tamaona, Desa Tabbinjai, Desa Pao, Desa Mamampang, Desa erelembang, Desa Bolaromang, Desa Balassuka. Mayoritas penduduk kecamatan tombolo pao berprofesi sebagai petani hal ini disebabkan letak geografis yang berada dibawah kaki gunung bawakaraeng.

#### **B. Gambaran Umum Desa Tabbinjai**

##### **1. Sejarah Desa Tabbinjai**

Secara historis pemberian nama Tabbinjai sebagai desa, karena dihubungkan dengan kondisi dan geologis wilayahnya yang terdiri dari banyak tebing. Kisah diceritakan oleh Burhan daeng Tompo yang sebelumnya menjabat

sebagai Kepala Desa sekitar Tahun 1961-an. Sebelum menjadi Desa Tabbinjai pada awal mulanya bernama Gallarrang yang terdiri dari : Gallarrang Suka dipimpin Pallao Panja, Gallarrang Balassuka yang dipimpin oleh Saeba Lebang dan Gallarrang Mamampang yang dipimpin oleh Musa yang dinaungi oleh Distrik Pao yang setingkat Kepala Wilayah Kecamatan<sup>45</sup>.

Pada Tahun 1961 ketiga Gallarrang ini bergabung menjadi satu dan berubah menjadi dua desa yaitu Desa Bontokarama yang dijabat oleh Burhan Daeng Tompo dan Desa Bontolebang yang dijabat oleh Saeba Balang. Desa Bontokarama ini terdiri atas tiga wilayah yakni Tabbinjai, Mamampang, dan Balassuka. Begitu juga dengan Bontolebang terdiri atas tiga wilayah yakni Kanreapia, Bolaromang dan Pakkeng<sup>46</sup>

Pada tahun 1965 seiring dengan peralihan nama Distrik Pao menjadi nama Kecamatan Tinggimoncong, maka Desa Bontokarama dan Desa Bontolebang disatukan menjadi Desa Tabbinjai. Diceritakan oleh Saeba Lebang dan Burhan Daeng Tompo bersama beberapa tokoh masyarakat Desa Tabbinjai lainnya, bahwa sekitar Tahun 1965 Desa Tabbinjai yang meliputi Tabbinjai, Mamampang, Balassuka, Kanreapia dan Bolaromang dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Najamuddin. Kemudian digantikan oleh Pak Habibu. Stelah Pak Habibu menjabat sebagai Kepala Desa, Najamuddin kembali masuk menjadi pejabat sementara Desa

---

<sup>45</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

<sup>46</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

Tabbinjai. Pada Tahun 1972 Najamuddin dan Syafruddin masuk menjadi calon Kepala Desa Tabbinjai dan berhasil dimenangkan oleh Najamuddin. Setelah memerintah beberapa tahun, Najamuddin dimutasikan oleh Pemda Gowa dan digantikan oleh Baso Rani Daeng Sitonra yaitu pada Tahun 1990. Setelah Baso Rani Daeng Sitonra menjabat 1 Tahun, maka tahun 1991 diadakan pemilihan Kepala Desa kembali antara Baso Rani Daeng Sitonra dengan A. Nasir dan dimenangkan oleh Baso Rani Daeng Sitonra. Kemudian pada Tahun 2001 sampai tahun 2013 Kepala Desa Tabbinjai dijabat oleh Bapak Drs. Tahir. L. Kemudian pada Tahun 2013 Kepala desa Tabbinjai dijabat oleh Zubair sampai sekarang<sup>47</sup>.

**Tabel. 4.1**

***Nama-nama Pejabat Administrasi Pemerintah Desa Tabbinjai Tahun 2013***

No	Nama	Jabatan
1	ZUBAIR	KEPALA DESA
2	JUFRI GENDA	SEKRETARIS DESA
3	NASRUN	KAUR PEMERINTAHAN
4	NURSYAMSI AH	KAUR PEMBANGUNAN
5	FITRAYANTI	KAUR UMUM

Sumber data : RPJM DesaTabbinjai tahun 2013

## **2. Letak Geografis Desa Tabbinjai**

---

<sup>47</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menenngah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

Desa Tabbinjai secara geografis berada pada ketinggian kurang lebih 500-800 diatas permukaan laut. Dengan keadaan curah hujan rata-rata 135 hari sampai dengan 160 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalaah 20- 30 Celcius<sup>48</sup>.

Secara administrasi Desa Tabbinjai terletak di Wilayah Kecamatan Tombolopao kabupaten Gowa. Wilayah Desa Tabbinjai secara administrasi dibatasi oleh wilayah Kabupaten dan desa tetangga.

a. Demografi / Batas Desa

- 1) Disebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bone
- 2) Disebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Balassuka
- 3) Disebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Mamampang
- 4) Disebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai

b. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan 8 Km

- 1) Ibu Kota Kabupaten 90 Km
- 2) Ibu Kota Provinsi 102 Km

c. Luas Wilayah Desa Dalam Tata Guna Lahan

Luas Wilayah Desa Tabbinjai 2.435 Ha terdiri dari :

- 1) Hutan Lindung : 1.250 ha
- 2) Sawah : 654,40 ha
- 3) Ladang : 650,40 ha

---

<sup>48</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menenngah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

4) Pemukiman : 42,10 ha

c. Wilayah Desa Tabbinjai terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu :

1) Wilayah Dusun Cengkong terdiri dari 2 (dua) Rukun Keluarga dan 4 (empat) Rukun Tetangga (RT) :

(a) RK 01 Cengkong 2 (dua) RT

(b) RK 02 Sakkayya 2 (dua) RT

2) Wilayah Dusun Suka terdiri dari 2 (dua) Rukun Keluarga dan 4 (empat) Rukun Tetangga (RT),

(a) RK 01 Suka 2 (dua) RT

(b) RK 02 Biringmamingko 2 (dua) RT

3) Wilayah Dusun Pattallassang terdiri dari 2 (dua) Rukun Keluarga dan 4 (empat) Rukun Tetangga (RT),

(a) RK 01 Pattallassang 2 (dua) RT

(b) RK 02 manora 2 (dua) RT

4) Wilayah Dusun Mapung terdiri dari 2 (dua) Rukun Keluarga dan 4 (empat) Rukun Tetangga (RT),

(a) RK 01 Mapung 2 (dua) RT

(b) RK 02 Bakubodo 2 (dua) RT

5) Wilayah Dusun Tuhoi terdiri dari 2 (dua) Rukun Keluarga dan 4 (empat) Rukun Tetangga (RT),

(a) RK 01 Tuhoi 2 (dua) RT

(b) RK 02 Tabbuakkang 2 (dua) RT <sup>49</sup>.

### **3. Kondisi dan ciri geologis wilayah**

Wilayah Desa Tabbinjai secara umum mempunyai kondisi geologis berupa daerah pegunungan dengan hamparan persawahan yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama penduduk, dan hutan yang didominasi oleh jenis pohon pinus, Rotan, Aren dan berbagai jenis tanaman kayu lainnya yang banyak menghasilkan getah pinus serta industri rumah tangga pembuat gula aren. Selain berupa hutan, Desa Tabbinjai merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu Bone yang menjadi sumber PLTA Mapung dan hulu Sungai Bawakaraeng<sup>50</sup>.

Sungai Biringmamingko yang menjadi batas antara Desa Tabbinjai dengan Kabupaten Sinjai berada di sebelah timur. Di Desa Tabbinjai secara umum kondisi tanahnya gembur dan subur semua jenis tanaman bisa tumbuh baik berupa palawija maupun tanaman jangka panjang<sup>51</sup>.

### **4. Struktur Kepemimpinan dan Pelayanan Publik**

Rukun Keluarga dan Rukun Tetangga sebagai satuan organisasi dalam satu wilayah dari Pemerintahan Desa Tabbinjai memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap kepentingan pelayanan masyarakat, terutama berkaitan hubungannya dengan Pemerintahan pada level di atasnya<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

<sup>50</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

<sup>51</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

<sup>52</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.



Struktur kepemimpinan Desa Tabbinjai tidak dapat lepas dari struktur administrasi Pemerintahan pada level di atasnya berdasarkan Perda Kabupaten Gowa No. 54 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008. Hal ini dapat dilihat dalam bagan.

**Tabel. 4.2**

***Nama-Nama Badan Permusyawaratan Desa Tabbinjai***

No	Nama	Jabatan
1	BAHAR	Ketua
2	ASRI	Anggota
3	BASRI	Anggota
4	ZAINUDDIN	Anggota
5	ERNI	Anggota
6	NURBAYA	Anggota
7	KADIR TAURI	Anggota
8	ANWAR	Anggota
9	TAPA	Anggota

Sumber data : RPJM DesaTabbinjai Tahun 2013

Pada Tabel 4. 2 adalah daftar nama nama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD ) Desa Tabbinjai. Lembaga ini yang bertugas sebagai lembaga pengontrol pemerintahan desa, menyiapkan agenda pemilihan desa, dan bersama-sama pemerintahan desa dalam membangun desa.

**Tabel. 4.3**

***Nama-nama Kepala Dusun Di Desa Tabbinjai***

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	A.SYahrullah	Dusun Cengkong
2	MUH. Agus	Dusun Suka
3	Nasir	Dusun Pattalasang
4	BADO'	Dusun Mapung
5	ABD. Salam	Dusun Tuhoi

Sumber data : RPJM Desa Tabbinjai Tahun 2013

Secara umum pelayanan Pemerintah Desa Tabbinjai kepada masyarakat sangat memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara dengan masyarakat terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan utamanya dalam persuratan dikerjakan dengan cepat.

## **5. Demografis dan Kependudukan**

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Tabbinjai, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3.028 jiwa. Dengan perincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.441 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan 1.587 jiwa<sup>53</sup>.

Berkaitan dengan data penduduk pada saat itu terlihat dari laporan hasil sensus kader pemberdayaan masyarakat (KPM) Desa Tabbinjai dalam rangka penetapan Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (PKM) pada akhir bulan Nopember

---

<sup>53</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

2010 dengan menggunakan alat kajian dengan system peninjauan pendataan langsung di masyarakat dan dijadikan sebagai Bank Data Desa, untuk kepentingan pembangunan masyarakat, perkembangan penduduk Desa Tabbinjai yang setiap bulan disampaikan pada Pemerintah Kabupaten melalui Kantor Camat Tombolo Pao. Sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini<sup>54</sup>.

**Tabel. 4.5**

***Data Penduduk Desa Tabbinjai***

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase (%)</b>
1	Laki-laki	1.441	49,7 %
2	Perempuan	1.587	50,3 %
<b>Total</b>		3.028	100 %

Sumbe data : RPJM Desa Tabbinjai tahun 2013

**Tabel. 4.6**

***Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur***

***Desa Tabbinjai***

<b>No.</b>	<b>Umur</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase (%)</b>
1	0 – 1 Tahun	28	30	58	2,0 %
2	1 – 4 Tahun	118	102	220	7,6 %
3	5 – 6 Tahun	52	46	98	3,4 %
4	7 – 15 Tahun	315	363	678	21,6 %

<sup>54</sup> RPJM Desa Tabbinjai Tahun 2013

5	16 – 21 Tahun	124	223	347	8,5 %
6	22 – 59 Tahun	704	722	1.426	49,4 %
7	60 Tahun ke atas	100	101	201	7,5 %
<b>Jumlah</b>		1.441	1.587	3.028	100

Sumber Data : RPJM Desa Tabbinjai Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan golongan 22-59 tahun menunjukkan angka yang lebih besar sekitar 49,4 % atau setara dengan 1.426 jiwa dibandingkan golongan umur yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia ini mereka produktif untuk bekerja dan menghasilkan pekerjaan.

## 6. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisasi atau pola pikir individu, selain itu akan mempermudah menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Tabbinjai Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

**Tabel. 4.7**

***Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenjang  
Pendidikan Desa Tabbinjai Tahun 2013***

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase dari Jumlah Penduduk</b>	<b>Ket.</b>
1	Tamat SD	641	22,08 %	
2	Tamat SLTP	81	2,79 %	
3	Tamat SMA	36	1,24 %	
4	Tamat Perguruan Tinggi	21	0,72 %	
5	Masih Sekolah di SD	443	20,21 %	
	SMP	97	3,34 %	
	SMA	32	1,10 %	
	Kuliah	16	0,55 %	
6	Belum Sekolah	340	11,36 %	
7	Tidak Tamat Sekolah	1.321	42,23 %	
<b>Total</b>		3.028	100 %	

Sumber data : Hasil Sensus (KPM) Desa Tabbinjai Nopember 2013

Dengan melihat Tabel Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan jenjang pendidikan yang di urai di setiap lingkungan mulai dari yang tidak tamat sekolah/tidak memiliki pendidikan sampai pada yang tamat perguruan tinggi, dapatlah disimpulkan bahwa taraf pendidikan warga masyarakat desa Tabbinjai sangat rendah, dari 3.028 Jiwa yaitu hanya 641 jiwa yang mampu menamatkan sekolahnya sampai pada tingkat Sekolah Dasar yang berarti 22,08% dari jumlah

---

penduduk, sementara SMP yang menempati urutan kedua dengan jumlah tamatan sebanyak 81 jiwa atau 2,79% dari jumlah penduduk, selanjutnya yang menempati urutan ketiga adalah SMA dengan 36 Jiwa atau 1,24% dari jumlah penduduk, sedangkan yang mampu menyelesaikan sampai pada perguruan tinggi sebanyak 21 orang atau sekitar 0,72% dari jumlah penduduk Desa Tabbinjai<sup>56</sup>.

## 7. Mata Pencarian

Secara umum mata pencarian masyarakat Desa Tabbinjai dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencarian, seperti petani, Buruh Tani, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha/Jualan, PNS/TNI/Polri, Pensiunan, Biro Jasa, Pertukangan, Sopir, dan Tukang Ojek. Sebagaimana dalam Tabel 4.8 sebagai berikut:

**Tabel. 4.8**  
***Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian***  
***Desa Tabbinjai Tahun 2013***

No.	Macam Pekerjaan	Jumlah	Presentase dari Jumlah Penduduk (%)
1	PNS	7	0,21 %
2	Polri	-	%
3	TNI	1	0,03 %
4	Pensiunan/LVRI	8	0,24 %
5	Pedagang	47	1,41 %
6	Petani	636	19,08 %

<sup>56</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menenngah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

7	Pertukangan	49	1,47 %
8	Wirausaha/Jualan	49	1,47 %
9	Peternak	1	0,03 %
10	Sopir	20	0,60 %
11	Perbengkelan	4	0,12 %
12	Jasa	15	0,45 %
13	Ojek	12	0,36 %
14	Buruh	8	0,24 %
15	Karyawan Swasta	3	0,09 %
<b>Jumlah</b>		857	25,80 %

Sumber data ; Hasil Sensus (KPM) Desa Tabbinjai Tahun 2013

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi di desa Tabbinjai jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian 29,9% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Kehidupannya tergantung disektor pertanian, petani 21,91% dan pertukangan sama posisinya dengan wiraswasta /jualan 1,69% dari total jumlah penduduk.

Terbanyak pertama penduduk bermata pencaharian adalah petani 21,91% sedangkan pertukangan dan wiraswasta / jualan menempati urutan kedua yaitu sebesar 1,69% dari jumlah total penduduk. Sementara urutan ketiga berada pada sektor perdagangan sebanyak 1,62% dan yang mempunyai persentase terkecil peternak dan TNI yaitu 0,3% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan.

Dengan demikian dari Desa Tabbinjai memiliki alternative pekerjaan selain bertani yaitu pertukangan dan wiraswasta<sup>57</sup>.

## **8. Aspek Sosial Budaya**

Perspektif budaya masyarakat di Desa tabbinjai masih sangat kental dengan budaya Makassar, walaupun budaya-budaya dari suku lain misalnya Bugis, dan budaya dari suku lainnya juga ada. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua Desa di Kabupaten Gowa masih kuat pengaruh Kerajaan Gowa. Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan social yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Di dalam hubungannya dengan agama yang dianut mislanya, Islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya Makassar<sup>58</sup>

Tradisi Budaya Makassar sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan-peringatan keagamaan yang ada di masyarakat terutama Islam, karena dipeluk mayoritas masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya. Atau kegiatan-kegiatan budaya yang bercampur dengan nuansa agama Islam. Contoh yang kita bisa lihat adalah peringatan Maulid, Isra' Mi'raj, kegiatan Assungka Bala, Appapole, Appalili, Accera anrong Pare, a'batu (kegiatan irigasi Pertanian)<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menenngah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

<sup>58</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menenngah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

<sup>59</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menenngah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.



Secara individual di dalam keluarga masyarakat Desa Tabbinjai, tradisi Makassar lama dipadu dengan agama islam, juga dtetap dipegang. Tradisi dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai bagian cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat. Misalnya tradisi appasili' dan assapu' dilaksanakan pada saat usia kehamilan memasuki usia tujuh bulan, akikah pada baru baru lahir.

Tetapi yang perlu diwaspadai adalah munsul dan berkembangnya pemahaman keyakinan terhadap agama ataupun kepercayaan tidak berakar dari pemahaman terhadap tradisi dan budaya masyarakat yang sudah aada. Hal ini mengakibatkan munculnya kerenggangan sosial di masyarakat dan gesekan antara masyarakat.

1. Jumlah Institusi lokal Desa

- a) KTI : 1 Buah
- b) Kelompok Tani : 5 Buah
- c) Dasa Wisma : 37 Buah<sup>60</sup>

**9. Dinamika Politik**

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistim politik di Indonesia, yang lebih demokratis, memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis dengan asas kepentingan orang banyak. Dalam dinamika politik memang banyak mengalami

---

<sup>60</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menenngah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

perkembangan yang cukup signifikan, Jabatan Kepala Desa memang sudah lama dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa Tabbinjai<sup>61</sup>

Hal ini menandakan bahwa masyarakat Desa Tabbinjai sudah sangat memahami mekanisme politik yang demokratis yang menganut sebuah rangkaian kata yang berbunyi memilih untuk berubah dengan memilih dan melihat etos kerja, kejujuran, serta kedekatan dengan warga sekitar. Seorang kepala Desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika seorang Kepala Desa melakukan pelanggaran Hukum dan norma-norma yang telah diatur dalam undang-undang, Kepala Desa juga biasa diganti jika berhalangan tetap. Pola kepemimpinan di Desa Tabbinjai dalam pengambilan keputusan berada ditangan Kepala Desa, namun semuanya dilakukan dengan mekanisme yang melibatkan pertimbangan dari masyarakat, melalui musyawarah untuk mufakat<sup>62</sup>.

### **C. Relasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Proses Pemungutan Pajak**

Sejalan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, secara bertahap peran pajak mengalami pergeseran yang cukup meningkat. Betapa tidak pajak yang dulu hanya sebagai pelengkap penerimaan dalam negeri kini telah bergeser pada posisi yang sangat penting dan menentukan terhadap kelangsungan kehidupan bernegara. Pajak sudah mampu memberikan kontribusi 80% bagi penerimaan negara.

---

<sup>61</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menenngah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

<sup>62</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menenngah (RPJM) Desa Tabbinjai Tahun 2013.

Reformasi perpajakan dimulai sejak tahun 1983 dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan yang disebut sistem *self assesment* (kesadaran sukarela). Adapun ciri-ciri sistem self assesment indonesia dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak merupakan pengabdian dan peran serta wajib pajak ( WP ) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan.
3. Anggota Masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Self assesment) sehingga melalui sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat wajib pajak<sup>63</sup>.

Dari ciri-ciri self assesment sendiri untuk kontes proses pemungutan pajak didesa tabbinjai belum menampakkan wujudnya yang nyata. Dimana dalam proses

---

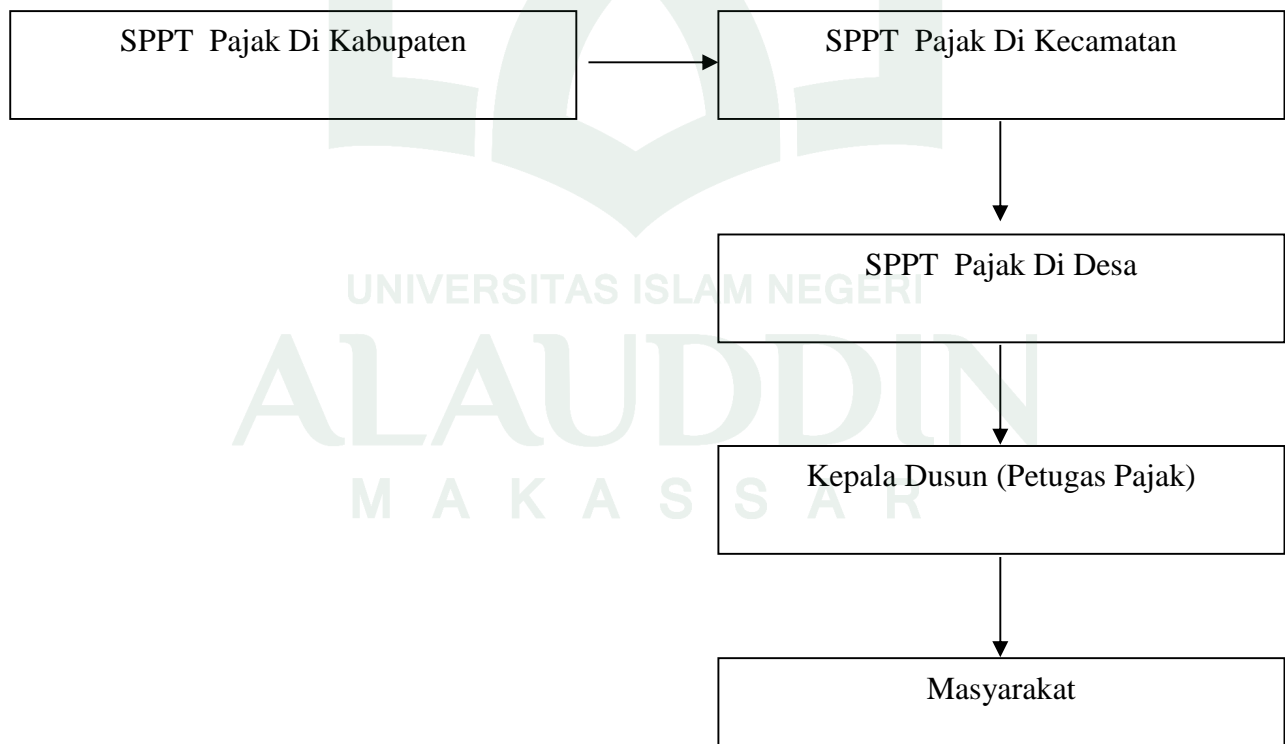
<sup>63</sup> Irwansyah Lubis, *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Beban Rakyat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 2

pemungutan pajak harus memuat ketiga ciri-ciri tersebut sehingga apa yang diinginkan oleh reformasi perpajakan bisa dicapai. Masyarakat harus diberi kepercayaan yang besar dalam hal perpajakan juga diberi ruang partisipasi yang memadai selaku wajib pajak. pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan juga harus memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Adapun proses pemungutan pajak di masyarakat dilakukan oleh petugas pajak yang diberi wewenang oleh pemerintahan desa untuk memungut pajak. secara ideal proses pemungutan pajak dapat di lihat pada bagan dibawah ini:

Tabel 4.9

Alur proses pemungutan secara umum



Apabila surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Sudah terbit di kabupaten, maka pihak kabupaten akan mengedarkan ke kecamatan masing-masing yang ada di wilayah mereka. Setelah SPPT pajak sudah sampai di kecamatan, maka pihak kecamatan dalam hal ini yang diberi wewenang akan menghubungi pihak pemerintahan desa untuk mengambil SPPT masing-masing yang ada di wilayah mereka semua. Setelah SPPT pajak sudah di ambil oleh pemerintahan desa, maka selanjutnya mereka akan memanggil para kepala dusun ( petugas pajak ) untuk mengambil bagian bagian mereka semua dan selanjutnya akan langsung ke masyarakat untuk memungut pajak.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak kepala Desa Tabbinjai :

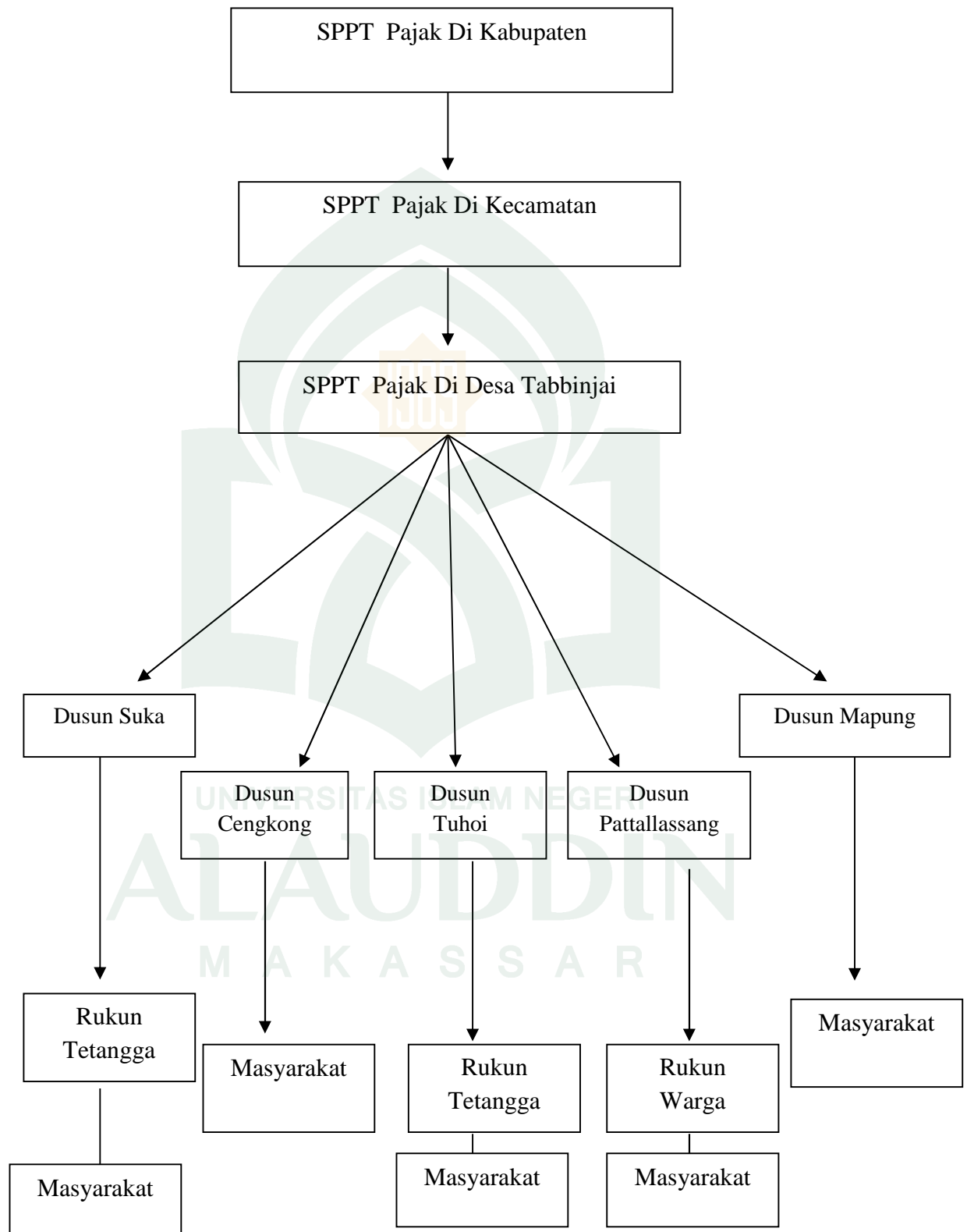
*“Apabila SPPT pajak sudah ada di kecamatan, kami akan di hubungi untuk mengambil bagian kami, setelah itu kami akan memanggil para kepala dusun dalam hal ini yang saya beri wewenang untuk memungut Pajak. Di desa Tabbinjai sendiri ada 5 dusun, jadi jumlah petugas pajak juga ada 5 orang yang memungut pajak ke masyarakat”<sup>64</sup>.*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa proses pemungutan pajak di desa tabbinjai ini di lakukan oleh masing-masing kepala dusun yang ada di desa tabbinjai yang di beri wewenang untuk memungut pajak. para kepala dusun inilah yang turun kelapangan memungut pajak masyarakat. Sedangkan proses pemungutan pajak di desa tabbinjai dapat di lihat pada bagan berikut ini :

Tabel 4.10 Proses pemungutan pajak di desa Tabbinjai

---

<sup>64</sup> Zubair (39 Tahun ) Kepala Desa Tabbinjai, Wawancara. Tabbinaji, 12 Juni 2017 pukul 16.30 Wita



Dari tabel di atas dilihat bahwa proses pemungutan pajak tidak hanya dilakukan oleh kepala dusun saja sebagaimana yang diberi wewenang untuk memungut pajak. sebagaimana pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa cuma dusun Cengkong dan dusun mapung yang memungut pajak sendiri. Sedangkan dusun Suka dan dusun Tuhoi dalam memungut pajak biasanya dibantu oleh ketua RT (Rukun Tetangga), sedangkan dusun Pattallasang dibantu oleh rukun warga.

Ketika SPPT pajak sudah sampai kepada para kepala dusun maka selanjutnya mereka ada yang menyampaikan di mesjid ketika hari jumat jika waktu untuk membayar pajak sudah tiba. Dari dua tabel pemungutan pajak diatas yakni antara tabel ideal dengan tabel kondisi lapangan tidak di temukan adanya proses sosialisasi yang khusus, baik itu kepada para petugas pajak maupun kepada masyarakat sendiri selaku wajib pajak. sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, yang ada hanya berupa penyampaian singkat bahwa SPPT pajak sudah terbit dan waktu untuk membayar pajak sudah tiba. Sebagaimana yang dikatakan oleh pak dusun Bado selaku petugas pajak :

*“Saya sudah kurang lebih 20 tahun menjabat sebagai kepala dusun dan menjadi petugas pajak, dalam kurung waktu itu kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi khusus dalam proses pemungutan pajak, biasanya sosialisasi itu diikutsertakan ketika kami mengikuti suatu kegiatan tertentu di kabupaten dan itu pernah dilakukan satu kali”<sup>65</sup>*

Dari pernyataan itu dapat dikatakan bahwa sosialisasi terkait proses pemungutan pajak di desa tabbinjai itu bisa dikatakan belum ada realisasi yang

---

<sup>65</sup> Bado (39 Tahun ) Petugas Pajak Dusun Mapung, Wawancara. Tabbinaji, 06 Agustus 2017 pukul 16.30 Wita.

kongkrit. Petugas pajak saja bisa dikatakan belum mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan khusus apalagi masyarakat selaku wajib pajak. Hal ini yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi direktorat jenderal pajak yang diberi wewenang untuk mengatur perpajakan agar lebih baik lagi, sehingga pendapat pajak juga semakin meningkat.

Penerimaan negara melalui pajak akan lebih bisa dioptimalkan apabila proses pemungutan pajak setiap daerah juga diperbaiki pelayanannya. Proses pemungutannya juga semakin diperbaiki sehingga semua masyarakat membayar pajak dan bisa membuktikan adanya proses demokratisasi dalam proses perpajakan. Adapun relasi yang tercipta dalam proses pemungutan pajak di desa tabbinjai antara lain :

### **1. Relasi Bersifat Mutualistik**

Pajak memiliki posisi strategis dalam politik karena pajak menjadi media yang menghubungkan negara dan rakyat. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang tidak beresiko. Sebagai sumber penerimaan negara yang berasal dari rakyat, pajak seharusnya dialokasikan untuk membangun kesejahteraan sosial dan sebagian lagi untuk membangun infrastruktur sosial dan cadangan devisa negara. Dengan melihat peran pajak yang begitu urgen terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa, maka proses pemungutan dan pengalokasian pajak harus transparan dan terbuka. Prosesnya pun harus betul-betul melibatkan rakyat karena pada dasarnya uang pajak itu berasal dari rakyat.



Melalui proses pemungutan pajak ini diharapkan munculnya proses demokratisasi, yakni terlihatnya peran sentral rakyat dalam hal kegiatan politik negara dalam konteks pemungutan pajak, yakni adanya transparansi dan akuntabilitas.

Proses perpajakan di desa tabbinjai sudah berlangsung sejak masih penjajahan belanda di indonesia. Makanya masyarakat kala itu mengenal dengan istilah pengukuran belanda karena tanah yang mereka bayar di ukur masa penjajahan belanda. Pada saat itu juga nama desanya belum di sebut desa Tabbinjai tetapi masih disebut dengan gallarang suka.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nuru Tuppu :

*“Kami sudah bayar pajak sejak masih penjajahan belanda atau yang dikenal dengan rente ketika desa tabbinjai masih di sebut dengan gallarang suka yang kemudian pada tahun 1962 berganti nama menjadi desa bonto karama yang dikepalai oleh Burhan daeng tompo. Saat itu juga masih menggunakan pengukuran belanda. Baru pada tahun 1975 kemudian di lakukan pengukuran yang terbaru menggantikan pengukuran belanda. Intinya kami sudah membayar pajak sudah dari nenek moyang kami sampai sekarang”<sup>66</sup>.*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa warga desa Tabbinjai sudah membayar pajak sejak masih penjajahan belanda sampai sekarang. Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan perpajakan sudah menjadi kegiatan tahunan masyarakat. Meskipun masyarakat sendiri tidak begitu paham dengan proses perpajakan itu sendiri.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Nuru Tuppu, wajib Pajak, Umur 54 Tahun, 20 Juli 2017 Pukul 19.30 Wita.

Proses pemungutan pajak di desa Tabbinjai dilaksanakan oleh para kepala dusun yang diberi wewenang atau tugas oleh pemerintahan desa. Para kepala dusun ini yang langsung turun dan berinteraksi dengan masyarakat dalam memungut pajak. Biasanya SPPT yang sudah di terima oleh kepala dusun di sampaikan kepada masyarakat melalui mesjid-mesjid ketika hari jumat. Kepala dusun biasanya dibantu oleh ketua Rukun Tetangga (RT) atau Ketua Rukun Warga (RW) dalam memungut pajak.

SPPT pajak sampai kepada para petugas pajak dari bulan Juni dan berakhir atau jatuh tempo pada tanggal 31 oktober. Dalam rentang waktu itu para petugas pajak diberi ruang untuk memungut pajak sebelum jatuh tempo.

Sebagaimana yang di katakan oleh Muh. Agus salah satu petugas pajak, bahwasanya :

*“Ketika SPPT itu kami terima dari pemerintah desa, saya langsung mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan SPPT meraka masing-masing. Terkadang ada masyarakat yang langsung membayar pajak meraka. Adapula yang terkadang dua tiga kali saya datangi baru membayar pajak meraka. Hal ini terjadi bukan karena meraka tidak mau membayar pajak akan tetapi sebagian besar karena faktor ekonomi masyarakat Tabbinjai”<sup>67</sup>.*

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menarik sedikit kesimpulan kecil bahwasanya keangangan atau ketidaktepatan masyarakat desa tabbinjai dalam membayar pajak bukan karena disebabkan akibat faktor tidak mau atau tidak peduli dengan pajak, melainkan karena adanya faktor ekonomi dan rendahnya pemahaman terkait perpajakan.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Muh. Agus petugas pajak, umur 36 Tahun, 14 Juni 2017 Pukul 16.30 Wita.

Dengan melihat kondisi proses pemungutan pajak seperti itu biasanya pihak pemerintah desa menalangi iuran pajak tersebut. Biasanya pemerintah desa melunasi terlebih dahulu iuran pajak dengan menyeter ke kecamatan sebelum masa jatuh tempo berakhir. Upaya pemerintah menalangi iuran pajak dalam hal ini sangat membantu masyarakat. Dimana mayoritas masyarakat desa tabbinjai bermata pencaharian sebagai petani. Terkadang mereka harus menunggu waktu panen baru melunasi iuran pajak mereka.

Upaya pemerintah juga dalam menalangi iuran pajak juga salah satunya disebabkan ada kepentingan tersendiri, yakni bagi pemerintahan desa akan mendapatkan *reward* (hadiah) dari pemerintah kabupaten bagi pemerintah desa yang tercepat melunasi pajak mereka. Namun disisi lain masyarakat juga sangat terbantu dengan upaya pemerintah tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala desa tabbinjai :

*“Apabila kami bisa melunasi uang pajak sebelum tanggal 17 agustus, maka kami berkesempatan untuk mengikuti undian yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten berupa 3 orang yang punya kesempatan untuk umroh, bisa mendapatkan pin emas. Meskipun untuk tahun ini desa tabbinjai tidak mendapatkan undian umroh tapi setidaknya dari 121 desa di kabupaten Gowa, cuman 39 desa berhasil melunasi iuran pajak mereka dan dari 39 desa tersebut tabbinjai masuk salah satunya”<sup>68</sup>.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan meskipun itikad baik pemerintah dalam menalangi iuran pajak punya maksud lain juga. Akan tetapi upaya ini juga

---

<sup>68</sup> Zubair (39 Tahun ) Kepala Desa Tabbinjai, Wawancara. Tabbinaji, 12 Juni 2017 pukul 16.30 Wita.

sangat membantu masyarakat desa tabbinjai dalam membayar pajak yang mayoritas adalah petani. Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh pak Bahar :

*“Meskipun jumlah SPPT pajak yang kami harus bayar nominalnya tidak terlalu besar, akan tetapi terkadang kami tidak langsung membayar pajak ketika petugas pajak datang ke rumah kami. Saya biasanya menunggu panen baru saya membayar pajak. dengan adanya upaya pemerintah membayar terlebih dahulu sangat membantu kami yang faktor ekonominya masih tergolong rendah”<sup>69</sup>.*

Hal ini juga diperkuat ketika wawancara penulis dengan pak Safar warga dusun pattallasaang yang mengatakan bahwasanya :

*Kami juga sangat terbantu dengan adanya upaya pemerintah desa menalangi terlebih dahulu uang pajak kami. Kami bisa menggunakan uang kami untuk keperluan lain sambil menunggu masa panen itu tiba.*

Dari beberapa pernyataan diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa relasi yang tercipta dalam proses pemungutan pajak di desa Tabinjai itu bersifat simbiosis mutualisme. Dimana hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya upaya pemerintah menalangi uang pajak mereka sebelum masa jatuh tempo berakhir. Sedangkan pemerintah juga memperoleh nama yang baik di mata masyarakat desa tabbinjai pada khususnya dan pemerintah kabupaten gowa pada umumnya. Selain itu pemerintah desa juga mempunyai kesempatan untuk ikut dalam undian hadiah bagi mereka yang melunasi uang pajak tercepat yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bahar, wajib Pajak Umur 45 Tahun 23 Juni 2017 Pukul 09.00 Wita

Akan tetapi upaya atau itikad baik pemerintah desa juga tidak selamanya berjalan sesuai yang mereka inginkan. Terkadang dari sekian SPPT yang mereka lunasi terlebih dahulu biasanya ada beberapa yang tidak dibayar kembali oleh masyarakat desa tabbinjai. Secara tidak langsung kerugian tersebut pemerintah desalah yang menanggungnya. Hal ini juga disebabkan anatar lain ada SPPT pajak yang dobel, ada juga SPPT pajak yang tidak jelas siapa nama pemiliknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh A. Syahrullah selaku petugas pajak :

*“Terkadang dari sekian banyak SPPT yang diberikan kepada saya, biasanya ada beberapa lembar yang sayai kembalikan kepada ke pemerintah desa, biasanya ada SPPT pajak yang dobel, bisa juga nama pemiliknya tidak jelas, ada juga beberapa objek pajak yang tidak jelas”<sup>70</sup>.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa meskipun relasinya bersifat mutualistik tapi terkadang masih ada sedikit celah yang memerlukan ada perbaikan kinerja dari semua pihak yang terkait sehingga proses perpajakan semakin baik. Dengan demikian proses perpajakan bisa dirasakan manfaatnya baik selaku masyarakat wajib pajak, petugas pajak, maupun pemerintahan desa serta semua yang terlibat dalam proses perpajakan.

## **2. Relasi Bersifat Terbuka**

Antara masyarakat dan pemerintahan desa dalam hal proses pemungutan pajak keduanya memiliki relasi atau hubungan yang bersifat terbuka, meskipun partisipasi masyarakat tidak begitu kongkrit dalam proses perpajakan.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan A. Syahrullah, Petugas Pajak umur 34 tahun, 7 Agustus 2017 Pukul 14.00 Wita

Untuk memperkuat aspek perpajakan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi diperlukan adanya sejumlah aspek yang menjadi ukuran terlaksananya sistem perpajakan yang demokratis, *pertama*, partisipasi efektif warga. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan perpajakan. *Kedua*, persamaan suara. Setiap warga negara memiliki ruang untuk terlibat efektif memberikan suara dalam pengambilan kebijakan perpajakan. *Ketiga*, pemahaman yang cerdas. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang dapat diterapkan. *Keempat*, pengawasan agenda. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang eksklusif untuk mengoreksi atau mendukung suatu kebijakan perpajakan<sup>71</sup>. Namun kondisi ideal ini belum bisa kita lihat secara real di lapangan. Proses pemungutan pajak hanya berupa transaksi semata antara petugas pajak dan wajib pajak. sangat jauh dari nilai-nilai demokratis yang diinginkan. belum ada pelibatan kongkrit masyarakat terhadap proses perpajakan. Akan tetapi dari beberapa petugas pajak yang penulis wawancarai semua warga masyarakat desa tabbinjai membayar pajak. Sebagaimana yang di utarakan oleh pak dusun bado selaku petugas pajak di dusun mapung, bahwasanya :

*Pada dasarnya semua warga dusun mapung membayar pajak meraka, hal ini disebabkan karena mereka sudah melihat adanya beberapa pembangunan di kampung meraka. Dulu pada awal saya memungut pajak terkadang ada beberapa warga saya yang terkadang bertanya, ini uang pajak mau dikemakan, digunakan untuk apa, tiap tahun kami harus membayar pajak*

---

<sup>71</sup> Edi Slamet Irianto, *Pajak Negara dan Demokrasi* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), h. 220.

*seperti ini. Akan tetapi beberapa tahun terakhir tingkat kesadaran mereka semakin meningkat terbukti ketika saya sampaikan di mesjid bahwa sudah ada SPPT pajak, Cuma kurang lebih 3 minggu semua hampir lunas terbayar.*

Hal ini juga di perkuat oleh A.syahrullah As selaku petugas pajak :

*“Seluruh warga dusun cengkong juga membayar pajak sebelum jatuh tempo habis. Hal ini semua SPPT pajak semuanya terlunasi. Meskipun ada beberapa yang saya kembalikan ke pemerinth desa karena ada beberapa SPPT yang tidak jelas objeknya dan ada yang dobel. Masyarakat membayar pajak karena mereka mengetahui bahwa dia tinggal di tanah milik negara dan sudah seharusnya mereka membayar pajak”<sup>72</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya masyarakat desa tabbinjai membayar pajak karena mereka sadar dan sudah melihat adanya beberapa bukti pembangunan dengan adanya pajak. Hal ini juga dikatakan oleh semua petugas pajak di desa tabbinjai bahwa semua SPPT pajak yang ada telah dibayar lunas, bahkan ada beberapa masyarakat yang datang ke kantor desa ketika SPPT pajak mereka tidak di terima dari petugas pajak. Sebagaimana diperkuat oleh argumen dari pak nasrun warga dusun cengkong yang mengatakan :

*“Kita membayar pajak karena selama ini kita tinggal di negara indonesia dan sudah sewajarnya kita harus membayar pajak. meskipun pajak yang kita bayar sangat kecil dan tidak sebanding dengan pembangunan yang masuk di desa kami”<sup>73</sup>.*

Dari hasil wawancara itu dapat dikatakan bahwa kesadaran warga desa tabbinjai terhadap pajak sudah bisa dikatakan baik. Meskipun pemahaman masyarakat terhadap terhadap pajak masih sangat rendah, mereka hanya sebatas

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan A. Syahrullah, Petugas Pajak umur 34 tahun, 7 Agustus 2017 Pukul 14.00 Wita

<sup>73</sup> Wawancara dengan Nasrun, wajib pajak umur 42 tahun, 8 Agustus 2017 Pukul 09.30 Wita

paham bahwa pajak yang mereka bayar kepada negara untuk mereka kembali. Mereka belum paham bahwa dalam proses perpajakan itu harus betul-betul terlibat dalam segala proses perpajakan, mulai dari perumusan, pelaksanaan dan penggunaan dan pengevaluasian perpajakan. Partisipasi masyarakat desa tabbinjai masih berupa keikutsertaan mereka membayar pajak tepat waktu. Hal ini disebabkan masih minimnya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat desa tabbinjai.

Seperti yang dikatakan Natsir selaku petugas pajak :

*“Masyarakat masih belum sepenuhnya paham dengan perpajakan. Mereka membayar pajak karena ini sudah menjadi rutinitas tahunan dan mereka hanya paham bahwa uang pajak mereka untuk negara. Minimnya sosialisasi membuat masyarakat tidak terlalu paham tentang perpajakan tersebut. Bahkan dalam SPPT ada yang tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu dan ini yang membuat masyarakat bertanya sola tersebut. Hal ini juga menurut saya perlu diadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat sehingga mereka paham betul tentang uang pajak”<sup>74</sup>.*

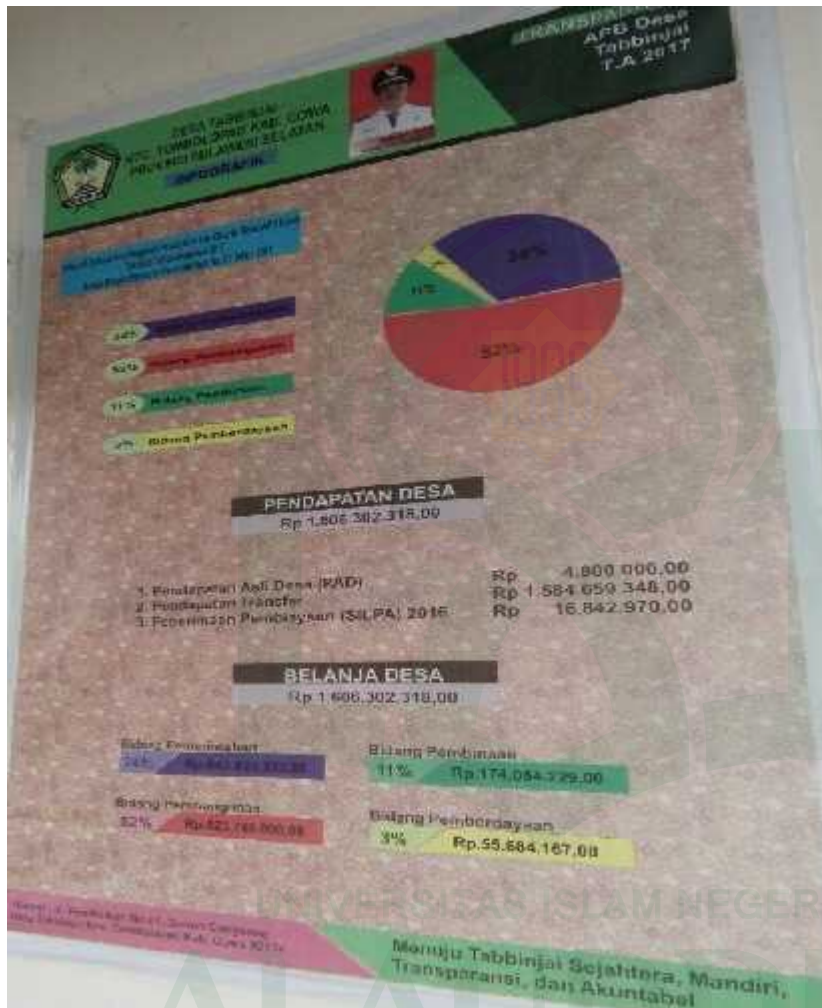
Dari hasil wawancara itu memang perlu diadakan sosialisasi-sosialisasi terhadap semua warga masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan mereka semakin meningkat dan mereka semakin paham terhadap perpajakan. Dengan beberapa argumen diatas dapat dikatakan bahwa relasi antara pemerintahan desa dan masyarakat terhadap proses pemungutan pajak bersifat terbuka. Transparansi terhadap proses pemungutan pajak dapat dikatakan sangat baik, karena informasi terhadap proses pemungutan pajak selalu di sampaikan di mesjid-mesjid atau tempat berkumpulnya masyarakat desa tabbinjai.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Natsir, petugas pajak umur 42 tahun, 10 Agustus 2017 Pukul 09.30 Wita



Dalam hal transparansi juga pemerintah desa tabbinjai juga bisa dikatakan sangat baik, sebagaimana dapat dijelaskan pada gambar berikut ini.



Gambar Transparansi Pendapatan Desa

Dari gambar di atas menunjukkan adanya transparansi yang sangat baik dari pemerintahan desa. Gambar ini terpampang di depan pintu masuk kantor desa, dengan demikian semua masyarakat akan tahun tentang dana-dana yang masuk di pemerintah desa dan digunakan untuk apa. Meskipun kita tidak mengetahui secara rinci penggunaan atau belanja desa yang sebesar Rp. 1.606.302.318,00. Yang

terpampang dalam spanduk ukuran 200x 100 cm itu hanya bentuk mentah dari anggaran yang ada, seperti anggaran di bidang pemerintahan sebesar Rp. 543.823.922,00. Anggaran di bidang pembangunan sebesar 823.740.000,00. Anggaran di bidang pembinaan sebesar Rp. 174.054.229,00. Anggaran di bidang pemberdayaan sebesar 55.684.177,00. Akan tetapi dengan adanya transparansi seperti ini akan membuat relasi masyarakat dan pemerintahan desa semakin bersifat terbuka khususnya dalam proses pemungutan pajak. sebagaimana kalimat yang tertera dalam pojok bawah sebelah kanan “ Menuju Tabbinjai Sejahtera, Mandiri, Transparansi, dan Akuntabel. Semua informasi-informasi yang menyangkut desa tabbinjai akan selalu di informasikan melalui mesjid-mesjid dan kegiatan-kegiatan lain seperti dalam kegiatan jumat ibadah yang dilaksanakan setiap pekan.

#### **D. Implikasi proses pemungutan pajak di desa Tabbinaji Kec. Tombolo Pao**

Pajak telah berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pembangunan nasional. Salah satu pembiayaan negara yang penting dalam hal ini adalah pembangunan sosial kemanusiaan, selain pembangunan lainnya. Dengan begitu pajak memiliki peran yang begitu penting. Oleh karena itu diperlukan diperlukan usaha yang efektif dalam proses pemungutan pajak.

Di tabbinjai sendiri proses pemungutan pajak mempunyai beberapa implikasi,

##### **1. Pembangunan**

Berbicara peranan pajak dalam hal pembangunan, tentunya tidak dapat dipisahkan dari permasalahan pokok kebijaksanaan pembangunan. Sasaran kebijaksanaan perpajakan atau fiskal dicerminkan dalam penerimaan dan pengeluaran negara yang setiap tahun merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Seperti diketahui bersama, kegiatan pembangunan yang setiap tahun makin meningkat dan meluas membutuhkan pembiayaan yang makin meningkat pula.

Dalam sektor anggaran negara, kebutuhan dana pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat menuntut peningkatan tabungan pemerintah. Peningkatan tabungan tersebut hanya bisa dicapai melalui pengoptimalan pemungutan pajak. jelasnya, peranan pajak dalam pembangunan harus benar-benar mampu untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri.

Aktualisasi pembangunan suatu negara dapat dikatakan berjalan atau terlaksana jika kita melihat barometer pembanguan desa, seperti akses daerah terpencil yang sudah dapat dijangkau dengan adanya jalur trasnportasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh pimpinan panus UU Desa, bapak budiman sudjatmiko yang mengatakan bahwa untuk membangun indonesai maka kita harus membangun desa, karena desa kuat indonesia hebat. Maka untuk menciptakan desa yang kuat adalah dengan adanya pembangunan-pembangunan yang ada dalam suatu pemerintahan desa. Pembangunan itu berupa sarana dan prasarana infrastruktur, akses informasi yang dapat dijangkau.

Sepeti halnya di desa tabbinjai, pembangunan-pembangunan dari adanya proses perpajakan juga bisa dapat dilihat secara langsung dengan adanya proyek-

proyek pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2017. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak kepala desa tabbinjai terkait pembagunan :

*“Proyek-proyek pembangunan yang masuk di desa Tabbinjai untuk tahun ini sangat banyak, di antaranya pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD 2), Pembangunan Jaringan air dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD 1), pembangunan paving blok, Pembuatan talut, pembukaan jalanan baru dan pembangunan jembatan”<sup>75</sup>.*

Dari hasil wawancara tersebut, penulis bisa mengatakan bahwa dari berbagai proyek tersebut menandakan bahwa sudah jelas adanya implikasi atau dampak pembangunan dari proses pemungutan pajak. Masyarakat sudah bisa merasakan dengan real adanya adanya pembangunan. Masyarakat desa tabbinjai dapat menjangkau dan mengakses semua daerah di tabbinaji secara muda dengan adanya pembangunan. Pembangunan jembatan tanggara salah satunya yang dapat mengakses tiga dusun yang dipisahkan oleh aliran sungai tanggara yakni dusun tuhoi, mapung dan pattalssang dengan dusun suka dan cengkong yang berada dalam jalur poros yang muda di akses. Pembangunan jembatan tersebut sangat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya.

Meskipun dari anggaran-anggaran pembangunan tersebut tidak secara langsung di peroleh dari pembayaran pajak iuran pajak masyarakat desa tabbinjai. Akan tetapi setidaknya masyarakat desa tabbinja bisa memberikan sumbangsih dengan melunasi pajak sebelum jatuh tempo. Dari iuran pajak tersebut akan

---

<sup>75</sup> Zubair (39 Tahun ) Kepala Desa Tabbinjai, Wawancara. Tabbinaji, 12 Juni 2017 pukul 16.30 Wita

diakumulasikan dengan iuran pajak yang lainnya kemudian dilakukan pemerataan pembangunan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Nuru tuppu yang merupakan salah satu warga dusun suka yang mempunyai lahan pertanian yang berada di dusun pattallasang :

*“Biasanya ketika kami panen padi, gabah kami biasa sampai di rumah sekitar pukul 22.00 malam, terkadang juga bermalam di jalan. Karena kami harus mengangkutnya secara manual perkarung, belum lagi jika hujan lebat turun yang membuat aliran sungai tanggara semakin membesar mengakibatkan padi-padi kami harus bermalam di jalan. Namun sekarang dengan adanya pembangunan jembatan tanggara membuat kami semakin mudah mengangkut gabah kami. Walaupun kendaraan tidak sampai langsung di depan sawah kami tapi dengan adanya pembangunan jembatan tanggara, gabah kami yang sudah di panen biasanya sampai di rumah sebelum magrib”<sup>76</sup>.*

Menurut hemat penulis sendiri, pembangunam dari hasil pemungutan pajak sudah dapat dirasakan oleh masyarakat di desa tabbinjai. Meskipun tidak semuanya karena tidak bisa di pungkiri wilayah tabbinjai adalah daerah lereng-lereng yang mempunyai banyak tebing sehingga ada banyak sungai-sungai kecil yang dapat memutus akses kendaraan utamanya kendaraan roda empat. Tapi kami berharap kedepan pembangunan di desa tabbinjai semakin merata. Semua wilayah dapat diakses dengan menggunakan kendaraan. Sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan langsung efek dari pembangunan.

Selain pembangunan jembatan, pembangunan lain yang dirasakan oleh masyarakat desa tabbinjai adalah adanya pembangunan sekolah menengah pertama

---

<sup>76</sup> Wawancara Nuru Tuppu, Umur 46 Tahun 17 Juni 2017 Pukul 17.00

(SMP) yang berada di dusun mapung yang berdampinagn dengan sekolah dasar (SD) Mapung. Sebelumnya di desa tabbinjai hanya ada tiga seklah dasar. Yakni SDI Cengkong yang berada di dusun cengkong. SDI Pattallasang yang berada di dusun pattallasang. SDI Mapung yang berada di dusun Mapung. Setelah mereka lulus sekolah dasar kebanyakan dari para siswa melanjutkan pendidikan di seklah menengah pertama yang berada di manipi kecamatan sinjai barat kabupaten sinjai karena sebelum pembangunan sekolah menengah pertama (SMP) di dusun mapung , SMP Negeri 1 Sinjai Baratlah yang paling mudah di akses oleh para siswa yang telah lulus sekolah dasar di desa tabbinjai. Meskipun jarak yang meraka tempuh kurang lebih 16 km pulang pergi. Penulis sendiri menyelesaikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di kecamatan sinjai karena belum ada pembangunan sekolah menengah atas pada waktu itu.

Sebagaima yang dikatakan oleh pak safar, bahwasanya :

*“Dengan adanya pembangunan sekolah menengah pertama di dusun mapung, memudahkan anak-anak kami untuk mengakses pendidikan dan tidak perlu harus menempuh jarak yang jauh untuk menuntut pendidikan dan kami juga berharap kedepan nanti akan kembali dibangun sekolah menengah atas yang dapat juga di akses anak kami”<sup>77</sup>.*

Menurut hemat penulis, tanggapan dari beberapa masyarakat tersebut menandakan bahwa implikasi dari porses pemungutan pajak berupa pembangunan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat tabbinjai. Semoga kedepan proses pemungutan pajak semakin trasnparan dan lebih baik lagi, sehingga manfaat dari proses perpajakan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Safar, Umur 37 Tahun 17 Juni 2017 Pukul 09.00

## **2. Pendapatan Pajak**

Semakin besar jumlah penerimaan atau pendapatan pajak maka semakin besar tabungan pemerintahan untuk membiaya pembangunan sosial. Peran dan fungsi pajak semakin penting dan sangat strategis dalam menunjang pengeluaran anggaran pembangunan belanja negara (APBN) dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah maupun dalam pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi.

Pentingnya membayar pajak menyadarkan kita bahwa tujuan uang pajak untuk membiayai pengeluaran rutin pembangunan seperti pembuatan infrastruktur (jalan, listrik, air, keamanan), member pendidikan gratis, menanggulangi bencana alam (tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi), dan lain-lain. Apabila semua masyarakat indonesia membayar pajak dan sadar akan pentingnya uang pajak maka semua proyek pembangunan akan terlaksana termasuk peningkatan kualitas manusia indonesia.

Untuk desa tabbinjai sendiri jumlah pendapatan pajak sebesar 24. 802. 058 rupiah pertahun 2017 berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Desa Tabbinjai. Jumlah ini diperoleh sebanyak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yakni 1.165 lembar. Jumlah objek pajak di desa tabbinjai sendiri tidak di ketahui secara pasti karena tidak ada data yang konkrit. Jumlah pendapatan pajak sendiri untuk desa Tabbinjai sangat kecil apabila dibandingkan dengan pembangunan-pembangunan yang terlaksana.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak kepala desa tabbinaji ketika wawancara dengan penulis, bahwasanya :



*“Jumlah pendapatan pajak untuk desa tabbinjai sendiri, tidak sebanding dengan pembangunan-pembangun yang ada di desa kami. Meskipun untuk keseluruhan jumlah pendapatan pajak desa tabbinjai berkisar kurang lebih 24 juta. Akan tetapi kami bisa memberi sumbangsi yang maksimal untuk menanbah penerimaan anggara pendapatan belanja negara yang selebih akan kembali diperuntukan untuk pembangunan”<sup>78</sup>.*

Dari hasil wawancara tersebut diatas maka penulis bisa mengambil sebuah kesimpulan kecil bahwa meskipun jumlah pendapatan pajak di desa tabbinjai tergolong masih sangat kecil tetapi setidaknya mampu memberi kontribusi terhadap penerimaan negara. Semakin besar pendapat pajak suatu daerah maka semakin besar pula sumbangsih untuk penerimaan negara, hal ini juga akan berdampak baik bagi pembangunan suatu negara pada umumnya dan daerah pada khususnya. Harapannya kedepan semoga proses pemungutan pajak di desa tabbnjai bisa lebih dioptimalkan agar pendapat pajak semakin meningkat juga.

Di desa tabbinjai sendiri masih banyak objek pajak yang belum mempunyai SPPT pajak. masyarakat sendiri yang tidak mempunyai objek pajak tidak pernah datang menanyakan kenapa tempatnya tidak mempunyai objek pajak. sebagaimana yang dikatakan oleh Muh. Agus selaku petugas pajak :

*“Di daerah suka sendiri masih banyak tempat yang belum mempunyai objek pajak. makanya perlu diadakan kembali pengukuran bagi tempat-tempat yang belum mempunyai SPPT pajak. di samping itu juga dengan adanya pengukuran kembali maka bisa memperbarui nama pemilik objek*

---

<sup>78</sup> Wawancara Zubair (Kepala Desa Tabbinjai), Umur 39 Tahun, 12 Juni 2017 Pukul 16.30  
Wita



*pajak yang ada dalam SPPT pajak yang kebanyakan masih memakai nama dan pemilik yang lama”<sup>79</sup>.*

Hal ini juga disampaikan oleh A. Syahrullah yang mengatakan:

*“Di daerah cengkong sendiri masih banyak juga yang belum mempunyai SPPT pajak. dan apabila diadakan pengukuran bagi daerah atau tempat yang belum punya SPPT pajak maka secara langsung juga akan meningkatkan pendapatan pajak desa tabbinja”<sup>80</sup>.*

Dari hasil wawancara tersebut diatas maka penulis bisa menarik sedikit kesimpulan kecil bahwa dengan diadakannya pengukuran terhadap tempat-tempat yang belum punya SPPT pajak akan menambah pendapat pajak desa tabbinjai. Selain itu dengan diadakannya pengukuran kembali maka juga akan mempermudah para petugas pajak dalam menagih pajak, karena selama ini nama dalam objek pajak kebanyakan masih menggunakan nama yang lama sehingga para petugas pajak susah mencari siapa yang harus membayar pajak. selain itu kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas pajak yakni dalam suatu tempat terkadang ada dua orng yang harus membayar pajak.

Meskipun sosialisasi terhadap agenda pengukuran kembali objek pajak sudah dilaksanakan kurang lebih dua tahun namun sampai sekarang belum ada realisasinya. Hal ini terjadi karena belum ada anggaran yang jelas. Pemerintah mengatakan untuk pengukuran kembali objek pajak bersifat gratis tapi hal ini belum terlaksana. Akan tetapi apabila ada masyarakat yang ingin melakukan pengukuran

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Muh. Agus petugas pajak, umur 36 Tahun, 14 Juni 2017 Pukul 16.30 Wita.

<sup>80</sup> Wawancara dengan A. Syahrullah, Petugas Pajak umur 34 tahun, 7 Agustus 2017 Pukul 14.00 Wita

kembali objek pajak, hal ini bisa dilakukan dengan catatan akan dipihakketigakan dengan menggunakan jasa orng lain. Dalam hal ini proses pengukuran akan memakai biaya. Besar biaya yang harus dibayar setiap satu kali pengukuran sebesar 150 ribu. Semakin tinggi pendapatan pajak suatu desa, maka semakin besar pula sumbangsihnya terhadap peningkatan anggaran pendapatan belanja negara. Salah satu cara peningkatan pendapatan pajak adalah dengan memperbaiki mekanisme proses pemungutan pajak dan pengukuran kembali tempat-tempat yang belum punya objek pajak. selain itu pelayanan yang baik, transparan juga akan meningkatkan pendapatan pajak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pajak memiliki posisi strategis dalam politik karena pajak menjadi media yang menghubungkan negara dan rakyat. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang tidak beresiko. Sebagai sumber penerimaan negara yang berasal dari rakyat, pajak seharusnya dialokasikan untuk membangun kesejahteraan sosial dan sebagian lagi untuk membangun infrastruktur sosial dan cadangan devisa negara. Dengan melihat peran pajak yang begitu urgen terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa, maka proses pemungutan dan pengalokasian pajak harus transparan dan terbuka.

Proses pemungutan pajak di desa tabbinjai mempunyai relasi yang bersifat simbiosi mutualisme dan relasi bersifat terbuka. Dikatakan bersifat simbiosi mutualisme karena dalam hal ini pemerintah desa melakukan itikad baik dengan terlebih dahulu melunasi iuran kepada pemerintah kabupaten sebelum masa jatuh tempo berakhir. Dalam hal ini masyarakat sangat terbantu dengan itikad baik tersebut dimana masyarakat bisa menunggu panen untuk bisa membayar iuran pajak meraka.

Selain memiliki relasi yang bersifat simbiosi mutualisme dalam proses pemungutan pajak antara pemerintahan desa dan masyarakat di desa tabbinjai, juga terdapat relasi yang bersifat terbuka, meskipun partisipasi masyarakat desa tabbinjai tidak terlalu kongkrit, sebatas ikut aktif membayar pajak sebelum jatuh tempo. Akan

tetapi transparansi terhadap proses pemungutan pajak sudah sangat baik. Meskipun sosialisasi terhadap perpajakan masih sangat rendah dan ini perlu menjadi bahan evaluasi perpajakan.

Selain memiliki relasi yang bersifat simbiosi mutualisme dan bersifat terbuka, proses pemungutan pajak juga mempunyai beberapa implikasi berupa pembangunan dan pendapat pajak. Dalam sektor pembangunan ada beberapa hal yang telah dirasakan oleh masyarakat Desa Tabbinjai diantaranya pembangunan jembatan tanggara yang menghubungkan antara dusun Suka dan Dusun mapung dan Dusun Tuhoi yang dapat mengakses jalan kedua dusun ini yang dipisahkan oleh sungai tanggara. Kemudian adanya pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bisa mempermudah para siswa yang telah lulus seklah dasar untuk melanjutkan pendidikan yang biasanya harus menumpang ke kabupaten sinjai yang menempuh jarak puluhan kilometer.

Dalam sekor pendapatan pajak sendiri, meskipun jumlah uang pajak yang terkumpul di desa Tabbinjai hanya berjumlah 24. 802. 058 Juta, akan tetapi setidaknya dapat memberikan sumbangsi untuk penerimaan negara dalam hal perpajakan. Disisi lain di desa Tabbinjai masih banyak tempat yang belum punya objek pajak dan ini perlu dilakukan pengukuran sehingga bisa menambah pendapat pajak suatu desa.

## B. Implikasi

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah desa seharusnya memberikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat terkait proses perpajakan agar mereka lebih memahami terkait perpajakan sehingga partisipasinya juga semakin meningkat
2. Perlunya diadakan kembali pengukuran tempat-tempat yang belum mempunyai objek pajak sehingga bisa mengdongkrak anggaran pendapatan belanja negara. Di samping itu perlu juga pengukuran kembali bagi objek pajak yang masih memakai nama yang lama sehingga bisa membantu para petugas dalam menagih pajak.
3. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya memberikan partisipasinya untuk ikut membangun negara dengan membayar pajak tepat waktu untuk kepentingan dan kesejahteraan negara dan masyarakat serta memberikan masukan baik kritikan mau pun solusi kepada pemerintah berkaitan dengan proses pemungutan pajak.

### *Dasftar Pustaka*

Al\_Qur'an Al-Karim

Alamsyah, Anggraini. Etika Politik. Makassar: Alauddin University Press, 2012

Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian ( Cet XI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2000)

Irianto, Edi Slamet. Pajak Negara dan Demokrasi. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009

Irianto, Edi Slamet. Jurdi, Syarifuddin. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005

Karim, Syahrir. *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*. Makassar: Alaudiin University Press, 2012

Lubis, Irwansyah. *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011

Muhajir, Neong. *Meodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Selatan, 1998

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013

Narbuko, Cholid dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Nisa, Haerun .”*Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda*”.*Skripsi*, Samarinda: Jurnal Administrasi Negara, 2015

Purwono, Hery.*Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010

J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet XXVII: Bandung: Remaja Rosdakarya 2010)

Jurdi, Syarifuddin. *Ilmu Politik Profetik (Historisitas, Kontekstualisasi dan Integrasi Keilmuan dalam Ilmu Politik)*. Makassar: Laboratorium Ilmu politik, 2015

Muzakki, Aden. *Ayat dan Hadis Tentang Pajak dan Asuransi* (September 2011), h. 1  
<http://www.google.co.id/webhp?sourceid=chromeinstan&ion=1&espv=2&ei=UTF-8#q=wordpress+hadist+tentang+Pajak> (Diakses 24 September 2016)

Rasyd, Harun *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*, Pontianak: STAIN Pontianak 2000

Rosmiati. *Modul Adminstrasi Pajak SMK 7 Makassar*, 2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tabbinjai , 2013

Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Sugiono. *Meode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

S. Nasution. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1998

Syamsuddin, Muriati dkk. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitaif, Kuantitatif, pengembangan dan mix-method*. Bandung: CV. Wade Group, 2015

Taylor, dan Bogdan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Bagong, Suyanto. Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada, 2005

Wahyono, Padmo. Syamsuddin, Nazaruddi. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

## **Jurnal**

Eddy rahmawan, *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Daerah*, Maret 2016.

Hairun nisa, *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda*, 29 Juli 2016.

Yudi khristina barus, *Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Di Kecamatan Medan Selayang*, Juni 2015

Tara restu ramanda, *Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak*, juni 2014

Puji Astuti, Tingkat Kepatuhan masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Cimancung Kecamatan Serang, Juli 2012.

### **Wawancara**

Wawancara Dengan Muh. Zubair (Kepala Desa Tabbinjai), Di Dusun Cengkong, Umur 39 Tahun, 12 Juni 2017 Pukul 16.30 Wita

Wawancara Dengan Bahar (Masyarakat), Di Dusun Suka, Umur 42 Tahun, 16 Juni 2017 Pukul 09.30 Wita

Wawancara dengan Muh Agus Petugas Di Dusun Suka , Umur 36 Tahun, 14 Juni 2017 Pukul 16.30 Wita

Wawancara Nuru Tuppu (Masyarakat ) Di Dusun Suka, Umur 46 Tahun 17 Juni 2017 Pukul 17.00 Wita

Wawancara dengan Safar (Masyarakat) Di Dusun Pattallassang, Umur 37 Tahun 17 Juni 2017 Pukul 09.00 Wita

Wawancara dengan Natsir, petugas pajak umur 42 tahun, 10 Agustus 2017 Pukul 09.30 Wita

Wawancara dengan Nasrun, wajib pajak umur 42 tahun, 8 Agustus 2017 Pukul 09.30 Wita

Wawancara dengan A. Syahrullah, Petugas Pajak umur 34 tahun, 7 Agustus 2017 Pukul 14.00 Wita



Gambar 1.



Wawancara dengan Kepala Desa Tabbinjai

Gambar 2.



Wawancara dengan Muh. Agus

Gambar 3.



Wawancara dengan A. Syahrullah

Gambar 4.



Wawancara dengan Pak Bado

Gambar 5.



Wawancara dengan Pak Safar

Gambar 6.



Wawancara dengan Nasrun





Alwi Dahlan, dilahirkan di kabupaten Gowa tepatnya di dusun Suka Desa Tabbinjai Kecamatan Tombolo Pao pada tanggal 30 Juni 1993. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Dahlan coe dan Hasna. Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SD Inpres Cengkong Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa pada tahun 2007. Pada tahun ini juga penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Sinjai Barat Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dan menyelesaikan study pada tahun 2009, serta pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Sinjai Barat diselesaikan pada tahun 2012 pada jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) juga di kabupaten sinjai.

Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik pada jurusan Ilmu Politik. Penulis pada tanggal 11 september 2017 memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) setelah mempertahankan skripsi yang berjudul “ Relasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Proses Pemungutan Pajak di Desa Tabbinjai Kec. Tombolo Pao”.

Motto : Semangat Menebar Energi Positif dan Kebermanfaatan